PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bambang Supriyanto
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Jakarta, 4 November 2020

OUTLINE

1. Kebijakan Hutan Sosial
2. Capaian Distribusi Akses Hutan Sosial dan KUPS
3. Kontribusi tenaga kerja dan produk
4. Kolaborasi KL Perhutanan Sosial
5. Ketahanan Pangan Perhutanan Sosial
6. Progress Kegiatan Pangan Agroforestry di Kalimantan Tengah
7. Pen Padat Karya Penanaman Mangrove Perhutanan Sosial
8. Dampak Perhutanan Sosial
9. Role model Perhutanan Sosial

1
Kebijakan Hutan Sosial

SKEMA PERHUTANAN SOSIAL

Perhutanan Sosial adalah sistem **pengelolaan hutan lestari** yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. (PermenLHK No.83/2016)



P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016
Tentang
Perhutanan Sosial
tanggal 25 Oktober 2016

IPHPS

PERHUTANI

Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial

P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017
tentang
Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani
tanggal 9 Juni 2017

Khusus di Pulau Jawa

UNDANG – UNDANG CIPTA KERJA

Pasal 29A

(1) Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 dapat dilakukan kegiatan Perhutanan sosial.

(2) Perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:

a. perseorangan;

b. kelompok tani hutan; dan

c. koperasi.

Pasal 29B

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- Kepastian hukum untuk k memayungi p83/2016; p39/2017 dan p17/2020 memastikan keadilan akses dan Pengelolaan hutan lestari oleh rakyat dengan prinsip keseimbangan ekologis, kohesi sosial yang mensejahterakan
- Mandat menyusun PP regim baru perhutanan sosial yang mengatur 5 skema plus hutan hak. UU 41/1999 dan PP 6/2007 perhutanan sosial masuk dalam pemberdayaan masyarakat.

KONDISI DAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIDALAM/SEKITAR HUTAN

Kondisi masy sekitar hutan

- **Desa di dalam/Sekitar Hutan = 25.863 desa**
- **Penduduk miskin di areal hutan 10,2 jt (36,73% dari total penduduk miskin di Indonesia)**
- **Ketidakadilan pemanfaata hutan, total pemanfaatan hutan 42 juta ha, swasta 40,46 juta ha (96%) dan masyarakat 1,75juta ha (4%)**
- **Konflik Tenurial,**
- **Kriminalisasi Masyarakat**
- **Kesenjangan Kota desa (Urbanisasi)**

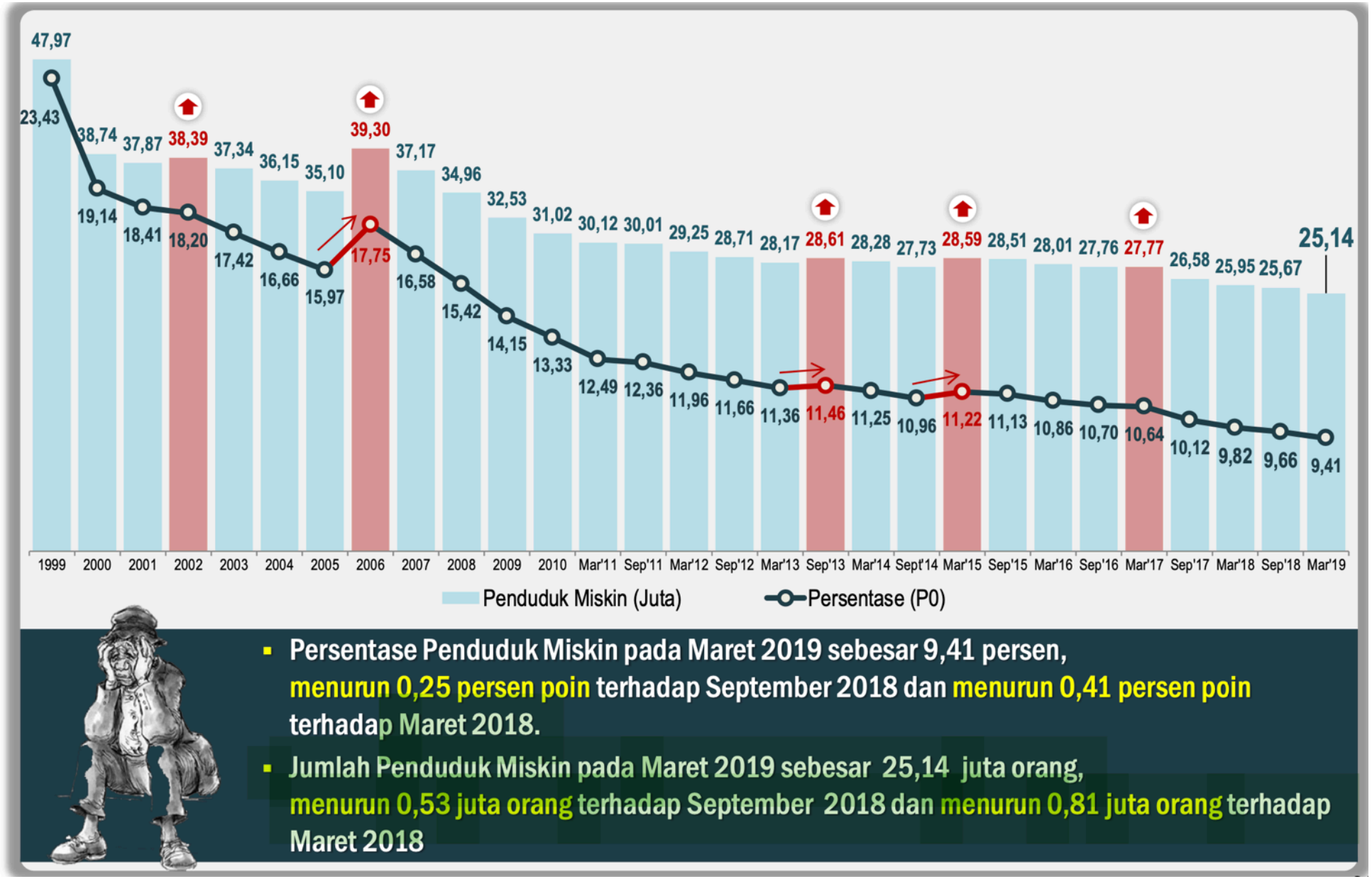
Upaya peningkatan kesejateraan

- **Perhutanan Sosial = 12,7 juta Ha (30%)**
- **Program pemerataan ekonomi**

Perkembangan Kemiskinan di Indonesia

TAHUN 1999 – MARET 2019

Proyeksi Bappenas akhir 2020 akan terjadi peningkatan jumlah kemiskinan 28,7 juta orang atau 10,7% dampak pandemi Covid19 dan penambahan pengangguran sebesar 2 juta jiwa



Ketimpangan Dan Kesenjangan Desa Kota



- Kebijakan afirmatif negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
- Ketimpangan penguasaan lahan, mendorong potensi besar untuk konflik sosial, menggangu stabilitas negara
- Menurunkan Rasio gini Indonesia yang sudah mencapai 0,41 (World Bank 2014). saat ini 0,397 (Maret 2016)

Gini Ratio
Kota : 0.52
Desa : 0.32

Gini Ratio menurun namun kesenjangan masih tinggi maka Presiden mengeluarkan **"Kebijakan Pemerataan Ekonomi"**

KEBIJAKAN PEMERATAAN EKONOMI FOKUS PADA :

KEBIJAKAN PEMERATAAN EKONOMI

- **LAHAN**
  - **ASSET**
    - **Land Tenure Right**
      (UUPA No.5/1960)
      - Korporasi perkebunan BUMN/ swasta dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU)
      - Kepada perorangan/badan hukum dalam bentuk SHM (sertifikat hak milik)
      - Asset Agrarian Reform
  - **ACCESS**
    - **Forest Tenure Right**
      (UU No.41/1999)
      (UU No.5/1967)
      - IUPHHK pada HPH/HTI To Corporate/BUMN/ Private Distribute consession to the Job
      - Access Agrarian Reform
- **KESEMPATAN**
- **KAPASITAS SDM**

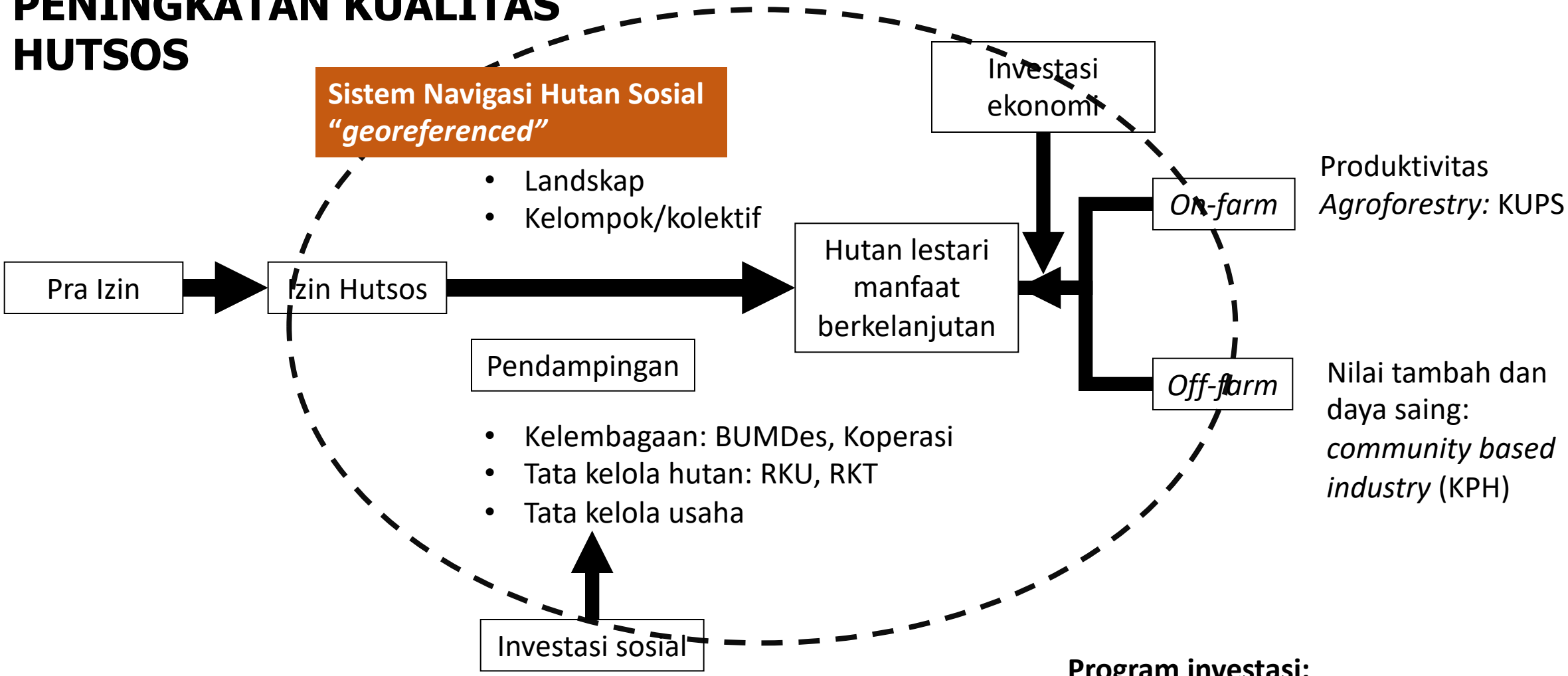
PERHUTANAN SOSIAL 12,7 JUTA HA

TUJUAN PERHUTANAN SOSIAL: ON-FARM -> OFF-FARM	
TUJUAN	Meningkatkan proporsi hak kelola masyarakat terhadap hutan hingga 10% (setara dengan 12,7 juta ha) dalam bentuk hutan sosial
DAMPAK JANGKA PENDEK	1. Perbaikan dan adaptasi sistem, tersedianya indikasi wilayah kelola dan perbaikan proses bisnis hutan sosial; 2. Perbaikan modal sosial 3. Perbaikan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro (BLU); 4. Pendampingan dan akses pasar terhadap produk masyarakat; 5. Peningkatan Kapasitas manajemen masyarakat
DAMPAK JANGKA MENENGAH	1. Pengembangan Ekonomi Domestik 2. Sentra produksi hasil hutan 3. Penurunan konflik tenurial 4. Kelestarian Hutan
DAMPAK JANGKA PANJANG	Terbangun pusat-pusat ekonomi domestik dan pertumbuhan desa sentra produksi hasil hutan berbasis desa yang menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan.

KRITERIA KEBERHASILAN PERHUTANAN SOSIAL

Kriteria	Indikator	
	Input	**Output**
Sosial	Kelembagaan Kelompok Tani/Lembaga Desa	Kelembagaan Kelompok Tani/Lembaga Desa berbadan hukum (Koperasi, BUMDes
Ekologis	Rencana Kerja Usaha/RKU dan Rencana Kerja Tahunan/RKT	• Rencana ruang kesepakatan • Rencana pemanfaatan ruang dengan kluster komoditas
Ekonomi	• Rencana peningkatan produktivitas • Rencana peningkatan nilai tambah komoditas	Desa sentra produk

PROGRAM PERCEPATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS HUTSOS



1. **"Program kerja bareng jemput bola"**
2. **Program *coaching* (tim terpadu) vertek bersama**

"Program 1 lokasi 1 pendamping"

Program investasi:

- **Bansos -> UKM/Koperasi**
  -> Antar Kementerian
- **KUR/BLU**
- **Program Kementerian/*off taker***

2
Capaian Distribusi Akses Hutan Sosial dan KUPS

CAPAIAN PERHUTANAN SOSIAL
SAMPAI DENGAN 16 OKTOBER 2020

Realisasi per Skema

NO	SKEMA	LUAS (HA)
1	HD	1,632,238.15
2	HKM	777,356.64
3	HTR	354,202.68
4	KEMITRAAN KEHUTANAN	
	A. KULIN KK	437,091.16
	B. IPHPS	28,245.49
5	HA*)	986,909.99
JUMLAH		**4,216,044.10**

REALISASI

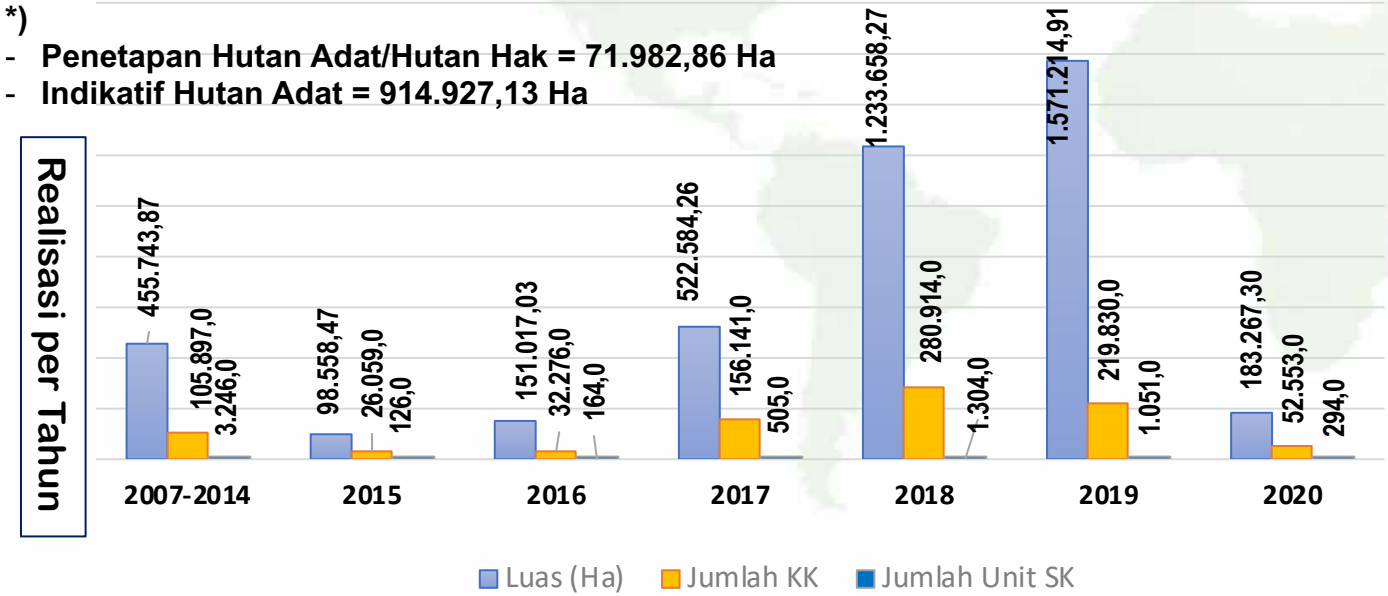
4.216.044,1 Ha

± 873.670 KK

6.690 Unit SK

Ijin/Hak

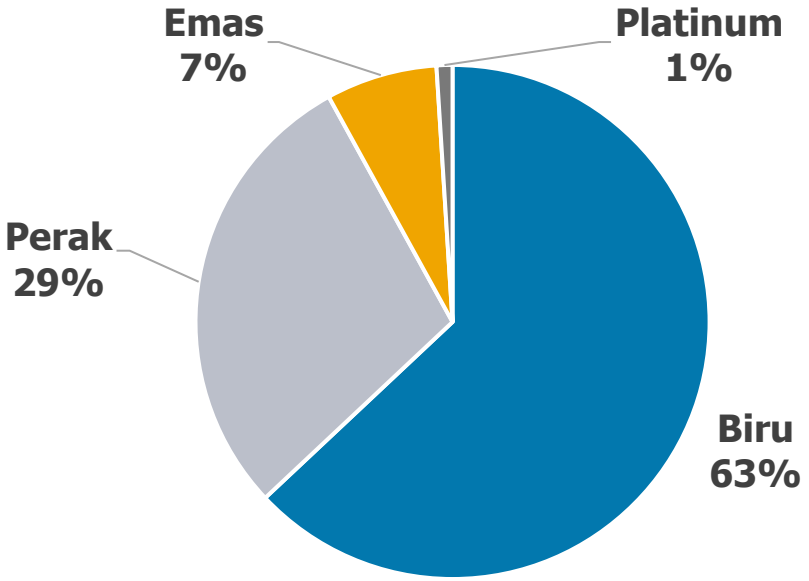
*)
- Penetapan Hutan Adat/Hutan Hak = 71.982,86 Ha
- Indikatif Hutan Adat = 914.927,13 Ha

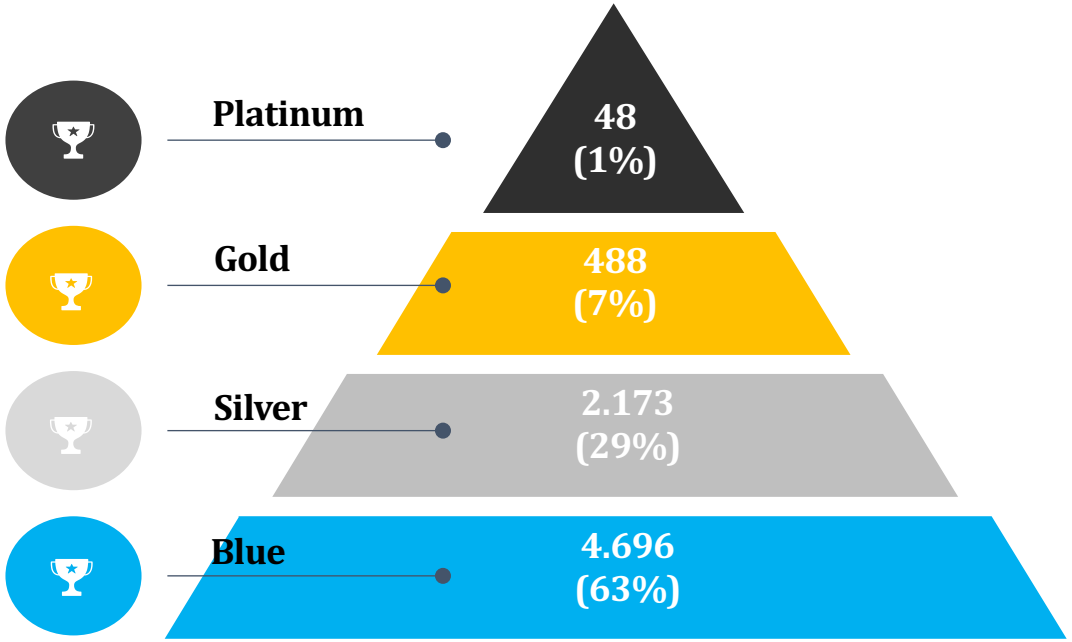


NO	PROVINSI	REALISASI		JML SK (Unit)	JML KK
		Alokasi	Capaian		
		LUAS (Ha)	LUAS (Ha)		
1	ACEH	466.267	208.834,38	48	16.162
2	SUMATERA UTARA	569.811	67.378,09	126	15.392
3	SUMATERA BARAT	676.473	227.658,78	243	128.068
4	RIAU	1.311.840	121.631,36	77	24.758
5	JAMBI	367.294	201.102,47	410	33.033
6	SUMATERA SELATAN	378.594	120.962,95	169	25.972
7	BENGKULU	147.199	64.245,63	123	13.154
8	LAMPUNG	383.594	215.202,86	335	74.498
9	KEP BANGKA BELITUNG	146.874	40.391,82	364	9.330
10	KEP RIAU	157.102	32.695,00	25	3.444
11	JAKARTA	-	-	-	-
12	JAWA BARAT	27.024	31.752,42	122	17.863
13	JAWA TENGAH	35.449	35.981,06	83	17.980
14	YOGYAKARTA	3.561	1.565,88	45	5.005
15	JAWA TIMUR	138.620	144.607,10	295	93.494
16	BANTEN	8.790	16.372,20	28	10.870
17	BALI	15.887	18.001,93	90	55.663
18	NUSA TENGGARA BARAT	311.666	34.317,17	140	22.536
19	NUSA TENGGARA TIMUR	519.818	51.403,40	211	16.055
20	KALIMANTAN BARAT	1.500.923	479.378,30	182	65.419
21	KALIMANTAN TENGAH	1.100.745	258.376,20	179	23.371
22	KALIMANTAN SELATAN	148.416	62.128,29	124	14.400
23	KALIMANTAN TIMUR	423.704	191.269,18	94	10.615
24	KALIMANTAN UTARA	258.776	394.022,27	72	9.596
25	SULAWESI UTARA	123.828	37.104,35	207	4.460
26	SULAWESI TENGAH	399.616	200.797,85	1.221	24.116
27	SULAWESI SELATAN	347.427	295.345,77	597	51.750
28	SULAWESI TENGGARA	342.209	85.457,32	184	14.689
29	GORONTALO	50.714	45.652,53	127	14.863
30	SULAWESI BARAT	105.887	45.123,82	469	4.471
31	MALUKU	232.829	185.587,72	116	23.044
32	MALUKU UTARA	194.746	140.737,83	93	19.067
33	PAPUA BARAT	650.476	63.002,19	55	6.961
34	PAPUA	2.365.708	97.955,99	36	3.571
TOTAL		**13.911.867**	**4.216.044,10**	**6.690**	**873.670**

CAPAIAN KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL

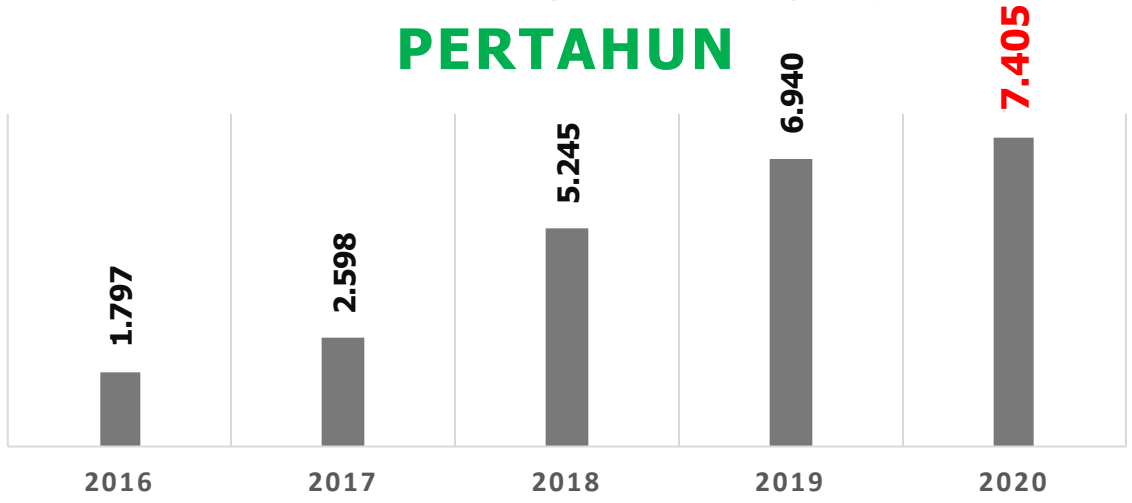
16 OKTOBER 2020





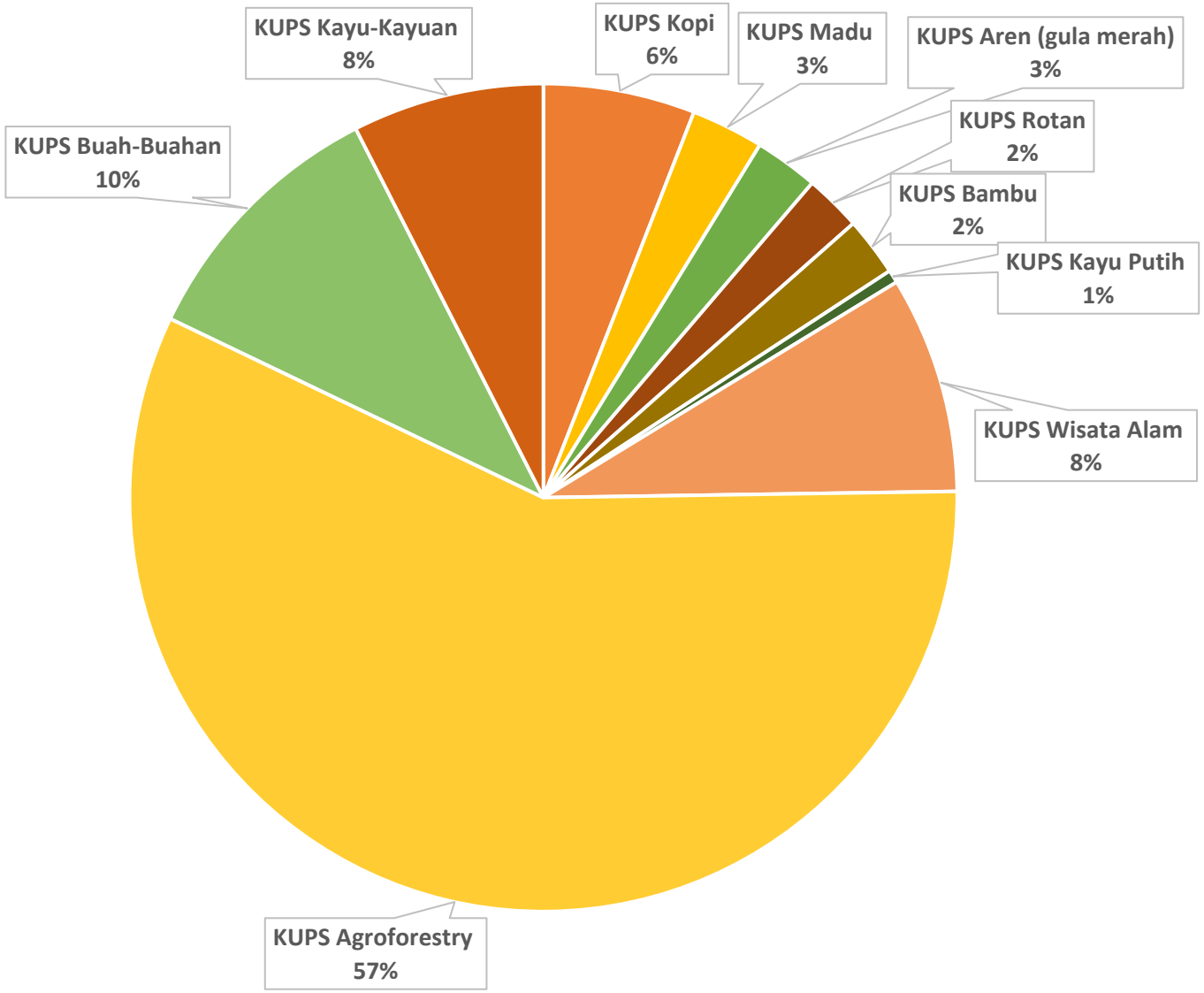
7.405 KUPS sd Oktober 2020

PEMBENTUKAN KUPS PERTAHUN



3
Kontribusi Tenaga Kerja Dan Produk

JUMLAH KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL



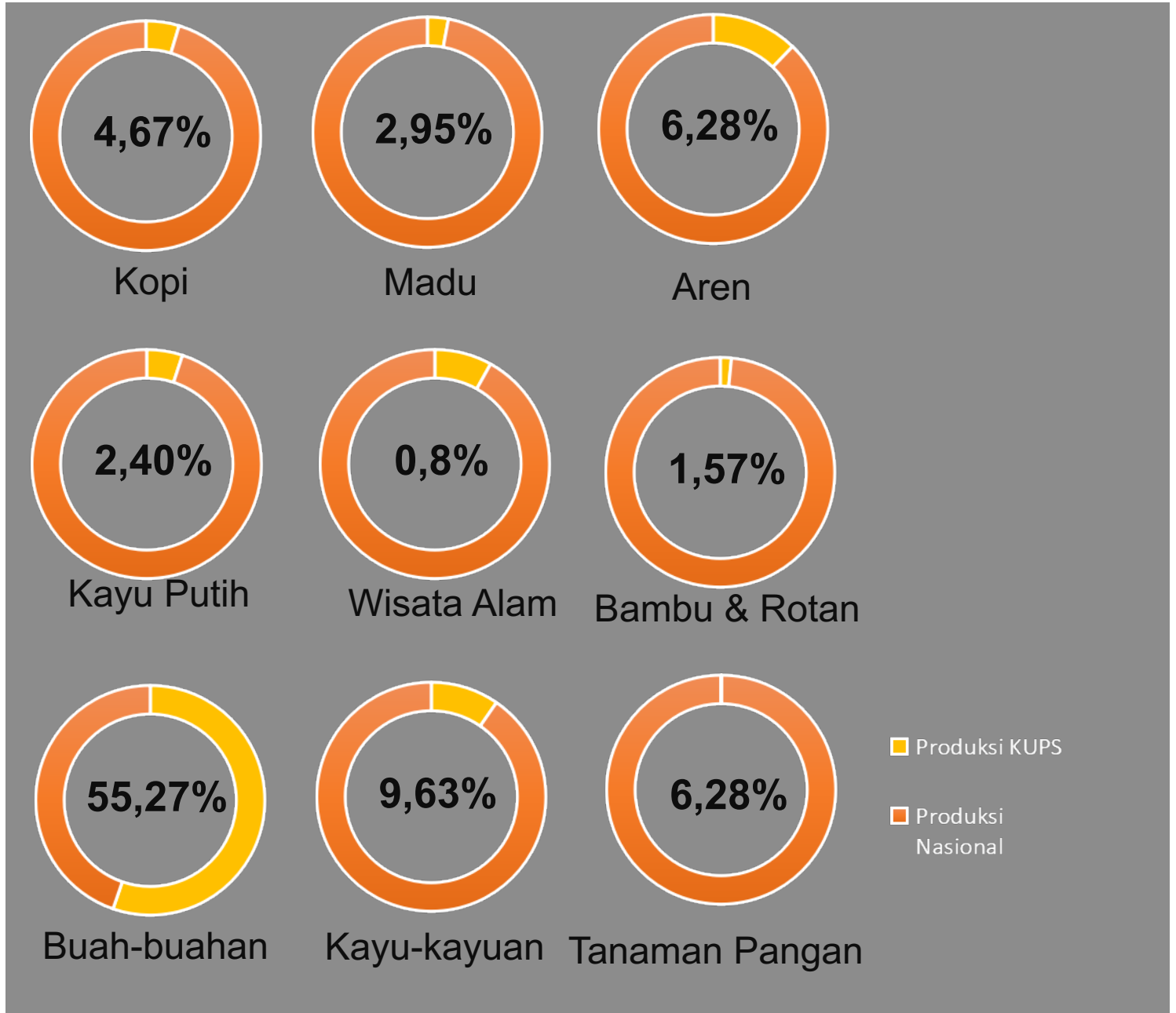


KUPS dengan komoditas terbanyak adalah Agroforestry* (57%), Buah-buahan (10%), Wisata Alam (8%), Kayu-kayuan (8%), Kopi (6%), Madu (3%), Aren (3%), Rotan (2%), Bambu (2%) dan Kayu putih (1%)

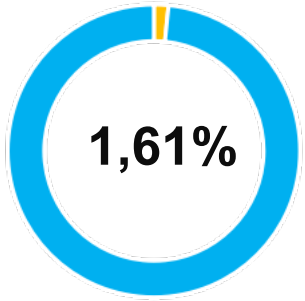
*) termasuk tanaman pangan

PRODUKSI TOTAL KUPS PER TAHUN

KOMODITAS	Produksi KUPS	Kebutuhan Nasional
Kopi	32.230,79 ton	690.000,00
Madu	1.591,83 ton	54.000,00
Aren	2.839,20 ton	45.189,00
Rotan dan Bambu	3.240,00 ton	206.479,00
Kayu Putih	59,94 ton	2.500,00
Wisata Alam	2.220.972 orang	275.000.000,00
Buah-Buahan	276.276 ton	499.833,00
Kayu-Kayuan	5.257.481,88 m3	54.621.937,00
Tanaman Pangan	9.750,60	94.505.011,00



KONTRIBUSI TENAGA KERJA PS



136.180.000
Jumlah tenaga kerja nasional

2.196.621
Tenaga kerja sektor Perhutanan Sosial

4
Kolaborasi KL Perhutanan Sosial

KOLABORASI TINGKAT NASIONAL: RPJMN 2020-2024

PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan : Rp. 392.035.236.000,-

PP 1 Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan

- KP1. Sistem jaminan sosial nasional
- KP2. Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran
- KP3. Kesejahteraan sosial
- K4. Penguatan layanan terpadu dan pendampingan
- KP5. Percepatan cakupan administrasi kependudukan
- KP6. Integrasi sistem administrasi kependudukan

PP 2 Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

- KP1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi
- KP2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
- KP3. Penguatan pengendalian penyakit
- KP4. Penguatan Germas
- KP5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan

PP 3 Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

- KP1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
- KP2. Afirmasi akses dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun
- KP3. Pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan
- KP4. Penjaminan mutu pendidikan
- KP5. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas
- KP6. Peningkatan tata kelola pendidikan
- KP7. Kapabilitas adopsi Iptek dan penciptaan inovasi

PP 4 Pengentasan Kemiskinan

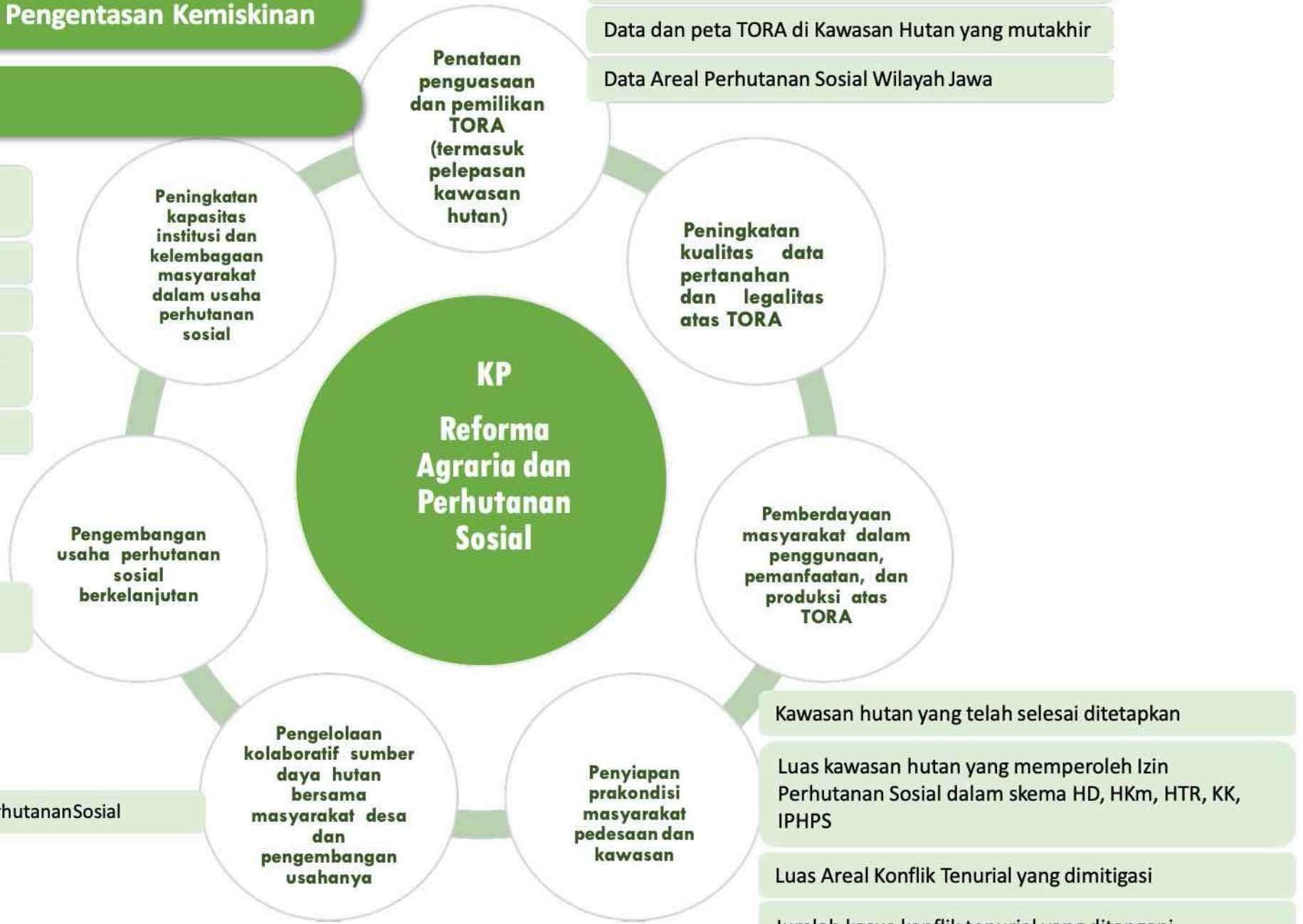
- KP1. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga
- KP2. Keperantaraan usaha dan dampak sosial
- KP3. Peningkatan akses pembiayaan ultra mikro
- KP4. Reforma agraria dan perhutanan sosial

PP 5 Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa

- KP1. Ketahanan budaya dan memori bangsa
- KP2. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan
- KP3. Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama
- KP4. Budaya literasi
- KP5. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, dan pemuda
- KP6. Penguatan kualitas keluarga
- KP7. Penguatan prestasi olahraga

Dukungan KLHK
PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

PP 4 Pengentasan Kemiskinan



- Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA
- Data dan peta TORA di Kawasan Hutan yang mutakhir
- Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa

- Pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui KTH/Kelompok
- Masyarakat Kelompok tani hutan mandiri
- Jumlah Kelompok Usaha
- Jumlah Mitra Pendamping pendukung Perhutanan Sosial yang diberdayakan
- Jumlah Pendamping Perhutanan Sosial

- Jumlah fasilitasi peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan

- Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

- Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan
- Luas kawasan hutan yang memperoleh Izin Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS
- Luas Areal Konflik Tenurial yang dimitigasi
- Jumlah kasus konflik tenurial yang ditangani

Ket: Beberapa Output dukungan KLHK

Presiden Joko Widodo
2 h ·

Bagaimana kabar program perhutanan sosial? Program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini tetap berjalan. Dari target 12,7 juta hektare perhutanan sosial yang dialokasikan oleh pemerintah, hingga September 2020 sebanyak 4,2 juta hektare telah diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola.

Jadi, masih ada 8 juta hektare yang perlu kita selesaikan dalam empat tahun ke depan.

Program yang telah dilaksanakan sejak enam tahun lalu ini adalah sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.

Perhutanan sosial bukan hanya urusan sebatas pemberian izin atau mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada masyarakat. Lebih penting dari itu adalah pendampingan untuk program-program lanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan mengelola kawasan yang telah diberikan.

RATAS: PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS PERHUTANAN SOSIAL

3 November 2020



PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020: Pemanfaatan Dana Desa Untuk Perhutanan Sosial (LAMPIRAN II)

- Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat Desa dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi: a)hutan desa b)Hutan Kemasyarakatan c)Hutan Tanaman Rakyat d)Hutan Adat e)Kemitraan Kehutanan.
- Pengolahan dan pengambilan manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan melalui peningkatan produktivitas agroforestry dan paska panennya serta peningkatan nilai tambha mellaui industry berbasis desa

Arahan Surat Mendagri Kepada Gubernur :

- Mengkoordinasikan Perangkat daerah terkait untuk mendukung Program PS
- Mengoptimalkan peran Pokja Percepatan PS dalam pendampingan pengembangan usaha PS
- mengintegrasikan program-program yang dapat berkontribusi terhadap implementasi pengembangan usaha PS kedalam dokumen Rrencana pembanguna daerah
- Meningkatkan kolaborasi perangkat daerah terkait keterpaduan program dan kegiatan pada lokasi yang sama
- Meningktkan keterlibatan stakeholder non pemerintah
- Mendorong BUMD dan Mitra swasta untuk dapat berperan aktif, menampung dan atau memasarkan produk PS
- Memfasilitasi kemudahan akses permodalan bagi pemegang ijin PS dari Bank daerah setempat
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Izin PS.

Arahan Surat Mendagri Kepada Bupati/Walikota

- Mengkoordinasikan Perangkat daerah terkait untuk mendukung Program PS
- Mengintegrasikan program-program yang dapat berkontribusi terhadap implementasi pengembangan usaha PS kedalam dokumen Rrencana pembanguna daerah
- Meningkatkan kolaborasi perangkat daerah terkait keterpaduan program dan kegiatan pada lokasi yang sama
- Meningktkan keterlibatan stakeholder non pemerintah
- Memfasilitasi pengembangan usaha PS masuk dalam agenda musyawarah pembangunan desa
- Mendorong BUMD dan Mitra swasta untuk dapat berperan aktif, menampung dan atau memasarkan produk PS
- Memfasilitasi kemudahan akses permodalan bagi pemegang ijin PS dari Bank daerah setempat

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Februari 2020

Nomor : 552/1391/SJ
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

Yth. Gubernur Seluruh Indonesia
(kecuali DKI Jakarta)
di -
Tempat

Dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan perhutanan sosial yaitu pemberian akses masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan kawasan hutan. Pemanfaatan kawasan hutan dilaksanakan melalui 5 (lima) skema yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan sistem kemitraan, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, realisasi pemberian akses kelola kawasan hutan sampai dengan bulan Desember 2019 yaitu penerbitan izin/hak kelola sebanyak 6.443 SK pada kawasan hutan seluas ± 4 juta Ha di 33 provinsi (data terlampir). Pada kenyataannya Izin pemanfaatan kawasan hutan yang sudah diterbitkan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk memberikan dukungan dengan mengambil beberapa langkah sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan perangkat daerah terkait guna mendukung program perhutanan sosial;
2. Mengoptimalkan peran kelompok kerja percepatan perhutanan sosial dalam pendampingan pengembangan usaha;
3. Mengintegrasikan program-program yang dapat berkontribusi terhadap implementasi pengembangan usaha perhutanan sosial ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
4. Meningkatkan kolaborasi perangkat daerah terkait melalui keterpaduan program dan kegiatan pada lokasi yang sama;
5. Meningkatkan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak;
6. Meningkatkan keterlibatan stakeholders non pemerintah;
7. Mendorong Badan Usaha Milik Daerah dan mitra swasta untuk dapat berperan aktif menampung dan/atau memasarkan produk hasil usaha perhutanan sosial;
8. Memfasilitasi kemudahan akses permodalan bagi pemegang izin dari bank daerah setempat;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan izin perhutanan sosial di kabupaten/kota di wilayah Saudara.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menteri Dalam Negeri,

Prof. Dr. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Sekretaris Kabinet;
8. Kepala Staf Kepresidenan;

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN FASILITASI PERHUTANAN SOSIAL

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepada masyarakat, pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan dan Pemangku Hutan Adat.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Fasilitasi Penyiapan, meliputi:
   1. Fasilitasi usulan permohonan;
   2. Fasilitasi penguatan kelembagaan;
   3. Fasilitasi peningkatan kapasitas; dan
   4. Fasilitasi tata batas areal kerja.

b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan, meliputi:
   1. Fasilitasi penyusunan perencanaan HN/HD/IUPHKM, IUHHK-HTR;
   2. Fasilitasi rencana pengelolaan kemitraan kehutanan; dan
   3. Fasilitasi rencana pengelolaan hutan adat.

c. Fasilitasi Pengembangan Usaha.

5
Ketahanan Pangan Perhutanan Sosial

Latar Belakang

- Dampak pandemi Covid 19 telah menimbulkan krisis multidimensi, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik.
- Akibat paling depan dari dampak kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus adalah kelangkaan dan krisis pangan dalam jangka menengah dan panjang.
- Negara-negara penghasil pangan besar di dunia telah mengambil langkah pengamanan cadangan pangan dalam negeri untuk memastikan terjaminnya stok pangan nasional.
- Presiden Joko Widodo telah memerintahkan para menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Indonesia Maju untuk antisipatif dalam menghadapi krisis pangan, ketahanan energi, dan sistem jaring pengaman sosial.



Kondisi Ketahanan Pangan Indonesia

- Peningkatan ketahanan pangan selalu menjadi prioritas pemerintah karena tak hanya menyangkut urusan kebutuhan dasar, juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional
- Ketahanan pangan telah menjadi isu sentral dalam pembangunan pertanian dan pembangunan nasional serta menjadi salah satu fokus kebijakan prioritas nasional sejak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024.
- Hampir setengah dari populasi atau 42 persen hidup di bawah *purchasing power parity* US$ 2 per hari *(World Food Program, 2013)*
- Indonesia rentan bencana alam dan perubahan iklim yang menjadi ancaman utama terhadap ketahanan pangan. Perlu diantisipasi menegakkan ketahanan pangan dengan strategi multidimensi
- Indeks Ketahanan Pangan Indonesia berada di peringkat 65 dengan skor 54,8. Posisi ini meningkat dibandingkan posisi tahun 2015 yang berada di urutan ke-74 *(The Economist Intelligence Unit, 2020)*. Membaiknya posisi dan indeks ketahanan pangan Indonesia ini terutama ditopang oleh tiga pilar, yakni keterjangkauan (affordability), ketersediaan (availability), dan kualitas dan keamanan (quality and safety)
- Pada tahun 2017 peringkat Indonesia 64, tahun 2018 naik menjadi 58. Skornya juga naik sangat tajam, yaitu 3,8 poin, dari skor 54,4 menjadi skor 58,2.
- Aspek ketersediaan pangan, Indonesia berada di atas Filipina (peringkat 63 dengan skor 55,6), Thailand (peringkat 65 dengan skor 54,7), Vietnam (peringkat 72 dengan skor 53,9) dan Myanmar (peringkat 78 dengan skor 51,4)

KONTRIBUSI HUTAN DALAM MENDUKUNG PANGAN

- Melalui kekayaan alam hayatinya, hutan menyimpan potensi plasma nutfah, flora dan fauna yang mampu mendukung pemenuhan kebutuhan pangan dan obat-obatan yang berkualitas dan nilainya cukup besar
- Produk hasil hutan besar manfaatnya bagi penyediaan pangan masyarakat, seperti umbut rotan, umbi-umbian, satwa, madu, buah-buahan. Bahkan sebagian produk hutan tersebut sudah menjadi komoditas ekspor, seperti porang.
- Produk herbal dari hutan, seperti pasak bumi, yang bermanfaat untuk menjaga stamina sehingga tetap bugar.
- Pemanfaatan hutan dalam penyediaan pangan dapat dilakukan secara tidak langsung dengan memanfaatkan kawasan hutan untuk memproduksi sumber pangan. Pemanfaatan kawasan hutan, khususnya pada hutan produksi, zona pemanfaatan taman nasional, atau hutan lindung, sudah banyak dilakukan bersama masyarakat untuk pengembangan komoditas pangan, obat-obatan, dan energi. Kegiatan agroforestri, wanamina (silvofishery), dan silvopastura (agro-peternakan) sudah banyak dikembangkan pada berbagai wilayah dan secara nyata memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penyediaan pangan nasional.
- Sejak 1998 hingga tahun 2010, luas kontribusi pangan dari sektor kehutanan mencapai lebih dari 16,43 juta hektare, dengan luas rata-rata mencapai 6,341 juta hektare per tahun dalam bentuk kegiatan tumpang sari pada kegiatan rehabilitasi hutan, pembuatan hutan tanaman, hutan rakyat. Tingkat produksi pangan yang telah dihasilkan mencapai lebih dari 9 juta ton atau setara produksi padi, jagung, kedelai per tahun. Walaupun produksi pangan dari hutan cukup besar, namun **belum tercatat dalam data statistik nasional**

Dari 6.940 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang terbentuk komoditas terbanyak adalah Agroforestry (28,8%), Buah-buahan (12,9%), Wisata Alam (10,5%), Kayu-kayuan (9,3%), Kopi (7,3%), Tanaman Pangan (6,8%), Madu (3,5%), Aren (3%), kayu putih (0,6%) dan rempah-rempah(17,3%).

Potensi Komoditi ekspor dari KUPS: kayu manis, kopi, kakao, udang, lada, pala, karet, produk perikanan

No.	Komoditas	Jumlah KUPS	Luas/ Unit Tahunan	Produksi Tahunan	Satuan
1	Gaharu	17	1.798	863.17	Ton
2	Jambu Mete	45	1.479	4.438	Ton
3	Kakao	61	21.124	10.562	Ton
4	Kayu Manis	6	846	1.100	Ton
5	Produk Perikanan	67	11.611	248.52	Ton
6	Kopi	324	155.101	310.202	Ton
7	Lada	29	10.037	10.037	Ton
8	Madu	207	207	51.75	Ton/Liter
9	Pala	76	22.206	13.324	Ton
	TOTAL	832	224.409	349.663	Ton

Jumlah KUPS 6.940 Unit, 239 diantaranya penghasil produk per tahun yang dapat meningkatkan ketahanan pangan

No.	Komoditas	Jumlah KUPS	Luas/ Unit Tahunan	Produksi Tahunan	Satuan
1	Cabe	32	643	45.03,7	Ton
2	Jagung	117	2.495	24.945	Ton
3	Padi	27	78	368	Ton gabah
4	Singkong	63	5.614	224.540	Ton
	Total	239			

POTENSI KOMODITAS PANGAN

DI AREAL PERHUTANAN SOSIAL

NO	POTENSI KOMODITAS	KUPS	POTENSI LUASAN
1	Alpukat	93	3,687.50
2	Apel	21	23.00
3	Aren	165	10,876.13
4	Belimbing	3	-
5	Buah Naga	6	-
6	Cabe	32	257.35
7	Cengkeh	53	6,971.34
8	Durian	85	4,468.87
9	Jagung	117	997.80
10	Jahe	37	1,004.66
11	Jambu Air	6	-
12	Jambu Mete	45	591.78
13	Jamur	4	170.40
14	Jengkol	51	2,446.12
15	Jeruk	53	5.20
16	Kacang	61	263.60
17	Kakao	61	8,449.56
18	Kapulaga	3	660.60
19	Kayu Manis	6	846.00
20	Kelapa	48	6,251.64
21	Kemiri	93	4,588.68
22	Kencur	2	-
23	Kentang	20	-
24	Kepiting	1	677.00
25	Klengkeng	13	23.00
26	Kopi	324	41,360.22
27	Kunir	6	225.20
28	Kunyit	15	88.44
29	Lada	29	4,014.90
30	Laos	7	28.20
31	Lemon	60	3.20
32	Madu	211	28,580.11
33	Mangga	58	78.60
34	Manggis	7	396.00
35	Melinjo	14	-
36	Nanas	19	386.60
37	Nangka	38	41.00
38	Padi	27	62.60
39	Pala	76	8,882.36
40	Palawija	7	24.20
41	Pepaya	49	688.00
42	Perikanan	66	22,580.60
43	Petai	27	171.32
44	Pisang	99	7,372.70
45	Rambutan	21	709.60
46	Sawo	7	-
47	Silvopasture	123	7,261.13
48	Singkong	50	1,235.20
49	Sirsak	20	35.40
50	Sukun	10	40.40
51	Tebu	12	-
52	Tembakau	10	-
53	Terong	21	61.60
54	Ubi Kayu	13	1,010.20
55	Udang	2	662.80
56	Vanili	8	786.68
		2515	180,047.49

LANGKAH KOLABORATIF DUKUNGAN PENYEDIAAN BAHAN POKOK PANGAN

1 STRATEGI KOLABORATIF BERSAMA PERHUTANI dan KEMENTAN

- Sosialisasi program
- Penentuan komoditas garapan
- Memasukkan kelompok masyarakat ke dalam Calon Petani & Calon Lokasi (CPCL) bantuan program pengembangan padi dan jagung.
- Langkah Kerja disusun bersama-sama KLHK, Perhutani dan Kementan termasuk penghitungan kalender tanam dengan agenda penanaman bertahap direncanakan s/d Akhir Mei 2020

Kebijakan



- Konsolidasi Kelompok tani / penggarap, petambak
- Fasilitasi/bantuan saprodi (benih, bibit, pupuk dan obat-obatan) serta alat pertanian kepada petani

Penguatan Organisasi Petani



- Jaminan harga/pembelian pasca panen oleh *offtaker* bidang pertanian, termasuk oleh Bulog

Penjaminan Hasil Panen



- Pembinaan Teknis terkait Budidaya
- Bimbingan teknis/pendampingan budidaya jagung dan padi melalui agroforestry oleh K/L terkait (Kementan, Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian)

Budidaya Pertanian



Jakarta, Juni 2020

2 IMPLEMENTASI KETAHANAN PANGAN DI JAWA DAN INHUTANI

Total Luas Implementasi Ketahanan Pangan pada wilayah kerja Perum Perhutani = 174.048 Ha

A PADI & JAGUNG

1. Jawa = 134.377 Ha

a Lahan Perum Perhutani

- → Padi = **15.371** Ha
- → Jagung = **88.605** Ha

b Lahan Perhutanan Sosial

- → IPHPS = **30.400,1** Ha

2. Luar Jawa = 3.345 Ha

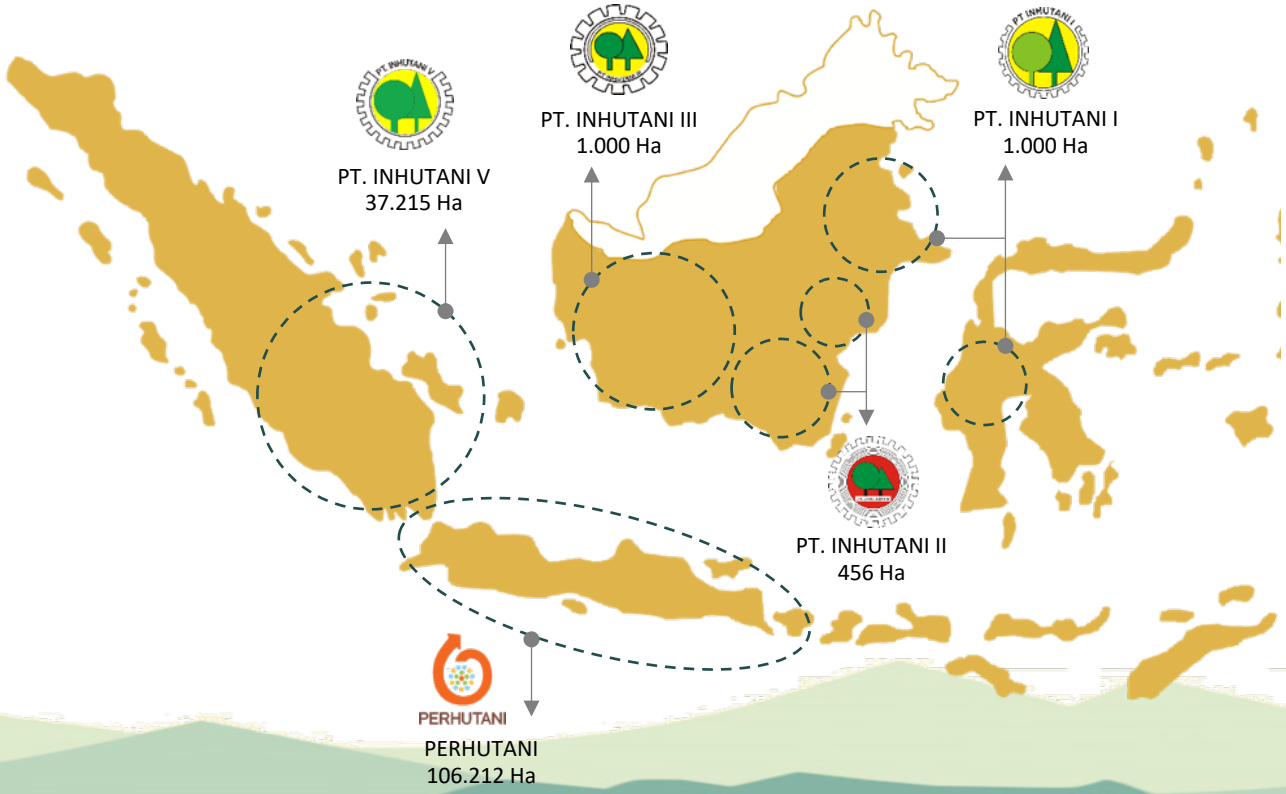
- → Padi = **289** Ha
- → Jagung = **3.056** Ha

B TEBU

1. Jawa = 1.845 Ha
2. Luar Jawa = 8.559 Ha

B LAIN-LAIN SINGKONG

1. Luar Jawa = 27.767 Ha



Catatan Perubahan Luas :

1. Sesuai dengan Database Agro per tgl 12 Mei
2. Data CPCL yang diusulkan untuk MT I 2021
3. Pada masing-masing KPH terdapat angka yg naik maupun turun dengan ket :
   - Naik = Data CPCL per 26 belum masuk
   - Turun = sudah direncanakan pada CPCL tapi tdk ada penggarapnya

Jakarta, Juni 2020

3 IMPLEMENTASI KETAHANAN PANGAN PERHUTANI DI PULAU JAWA

Lokasi Perum Perhutani



PADI

JATENG **Luas 424 Ha** pada 4 KPH
Produkstifitas 1,48 Ton/Ha

JATIM **Luas 1.884 Ha** pada 11 KPH
Produktifitas 1,76 Ton/Ha

JANTEN **Luas 13.064 Ha** pada 12 KPH
Produktifitas 1.89 Ton/Ha

TOTAL PADI

- **Luas 15.371Ha**
- **Produktifitas 1,85 Ton/Ha**
- *Permen LHK P.83/2016*



JAGUNG

JATENG **Luas 38.514 Ha** pada 17 KPH
Produktifitas 1,99 Ton/Ha

JATIM **Luas 49.190 Ha** pada 19 KPH
Produktifitas 2,46 Ton/Ha

JANTEN **Luas 901 Ha** pada 3 KPH
Produktifitas 3 Ton

TOTAL JAGUNG

- **Luas 88.605Ha**
- **Produktifitas 2,26 Ton/Ha**
- *Permen LHK P.83/2016*



TEBU

JATENG **Realisasi 83,7Ha**
Luas Potensi 1.083 Ha pada 7 KPH
Produktifitas 57 Ton/Ha

JATIM **Realisasi 1.696,7Ha**
Luas Potensi 11.125 Ha pada 8 KPH
Produktifitas 60 Ton/Ha

JANTEN **Realisasi -**
Luas Potensi 11.428 Ha pada 1 KPH
Produktifitas 50 Ton/Ha

TOTAL TEBU

- **Realisasi 1.780,4Ha**
- **Luas Potensi 23.636 Ha**
- **Sisa Potensi 21.855,6 Ha**
- Produktifitas 55,7 Ton/Ha
- *Implementasi Permen LHK P.81/2016*

Jakarta, Juni 2020

4 IMPLEMENTASI KETAHANAN PANGAN PERHUTANI DI LUAR JAWA

Lokasi Luar Jawa Perhutani Group



PADI

IHT V → **Luas 289 Ha**
→ Produktifitas 1,8 Ton/Ha

TOTAL PADI

- ❑ **Luas 289 Ha**
- ❑ **Produktifitas 1,8 Ton/Ha**



JAGUNG

IHT I → **Luas 1.000 Ha**
→ Produktifitas 6 Ton/Ha

IHT II → **Luas 456 Ha**
→ Produktifitas 4,5 Ton/Ha

IHT III → **Luas 500 Ha**
→ Produktifitas 6 Ton/Ha

IHT V → **Luas 1.100 Ha**
→ Produktifitas 6 Ton/Ha

TOTAL JAGUNG

- ❑ **Luas 3.056 Ha**
- ❑ **Produktifitas 5,7 Ton/Ha**



SINGKONG

IHT III → **Luas 500 Ha**
→ Produktifitas 24 Ton/Ha

IHT V → **Luas 27.267 Ha**
→ Produktifitas 26 Ton/Ha

TOTAL SINGKONG

- ❑ **Luas 27.767 Ha**
- ❑ **Produktifitas 26 Ton/Ha**



TEBU

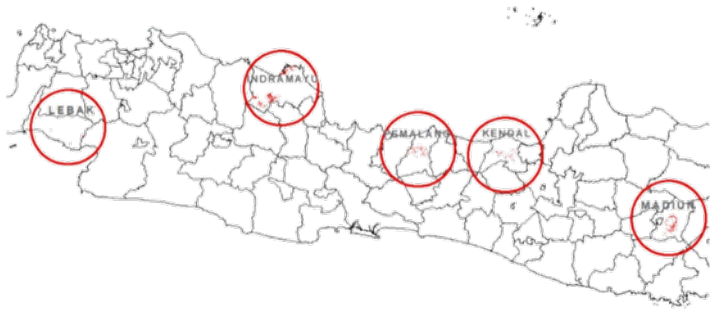
IHT V → **Luas 8.559 Ha**
→ Produktifitas 96 Ton/Ha

TOTAL TEBU

- ❑ **Luas 8.559 Ha**
- ❑ **Produktifitas 96 Ton/Ha**

Jakarta, Juni 2020

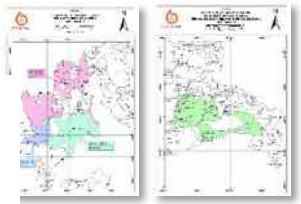
5 LOKASI MODEL KETAHANAN PANGAN



1 LEBAK BANTEN

- Komoditas Jagung
- 4 KT /LMDH
- 658 Petani
- Luas 875 Ha
- Produktivitas 5 Ton/Ha





- Dari luas 1.215 Ha seluruhnya sudah ditanami jagung, apabila mendapatkan benih akan dialokasikan pada musim tanam bulan September untuk luas 875 Ha
- Benih mendapat bantuan dari dinas pertanian, pupuk belum mendapat bantuan.

2 INDRAMAYU JAWA BARAT

- Komoditas Padi
- 15 KT / LMDH
- 3.035 Petani
- Luas 1.659,94 Ha
- Produktivitas 3,6 Ton/Ha





- Dari luas 5.730 Ha pada musim tanam ke-2 (MT2) hanya 1.659,94 Ha yang akan ditanami karena lahan ini adalah sawah tadah hujan.

3 PEMALANG JAWA TENGAH

- Komoditas Jagung
- 47 KT / LMDH
- 3.382 Petani
- Luas 6.155,05 Ha
- Produktivitas 5,8 Ton/Ha





- Dari luas 6.155,05 Ha yang turun SK baru 692 Ha seluruhnya sudah ditanami jagung, apabila mendapatkan benih akan dialokasikan pada musim tanam ke-2 bulan Oktober
- Untuk saat ini yang diperlukan adalah pupuk

4 KENDAL JAWA TENGAH

- Komoditas Jagung
- 49 KT/LMDH
- 8.597 Petani
- Luas 2.943,07 Ha
- Produktivitas 3 Ton/Ha





- Dari luas 2.943,07 Ha seluruhnya sudah ditanami jagung apabila mendapatkan benih akan dialokasi pada musim tanam bulan Oktober - November
- Untuk saat ini yang diperlukan adalah pupuk.

5 MADIUN JAWA TIMUR

- Komoditas Jagung
- 15 KT / LMDH
- 5.372 Petani
- Luas 2.149,34 Ha
- Produktivitas 3,5 Ton/Ha





- Dari luas 2.149 Ha saat ini sebagian besar sudah ditanami





Keterangan:

0 = jelutung rawa, vvv = tanaman semusim (jagung, cabe, kacang panjang, dll).

Jarak tanam jelutung 5,25 m x 3 m.





Keterangan:

0 = jelutung, # = karet = padi tahun (padi lokal).

Ukuran lahan 30 m x 190 m = 0,57 ha. Kerapatan jelutung 421 pohon per ha.

Jelutung ditanam pada bulan Oktober 2004, diukur pada tanggal 9 Maret 2011.

Jumlah baluran 8 buah, dengan ukuran 1,7 m x 190 m.

Riap diameter jelutung 1,56 m per tahun, riap tinggi 89,47 m per tahun.

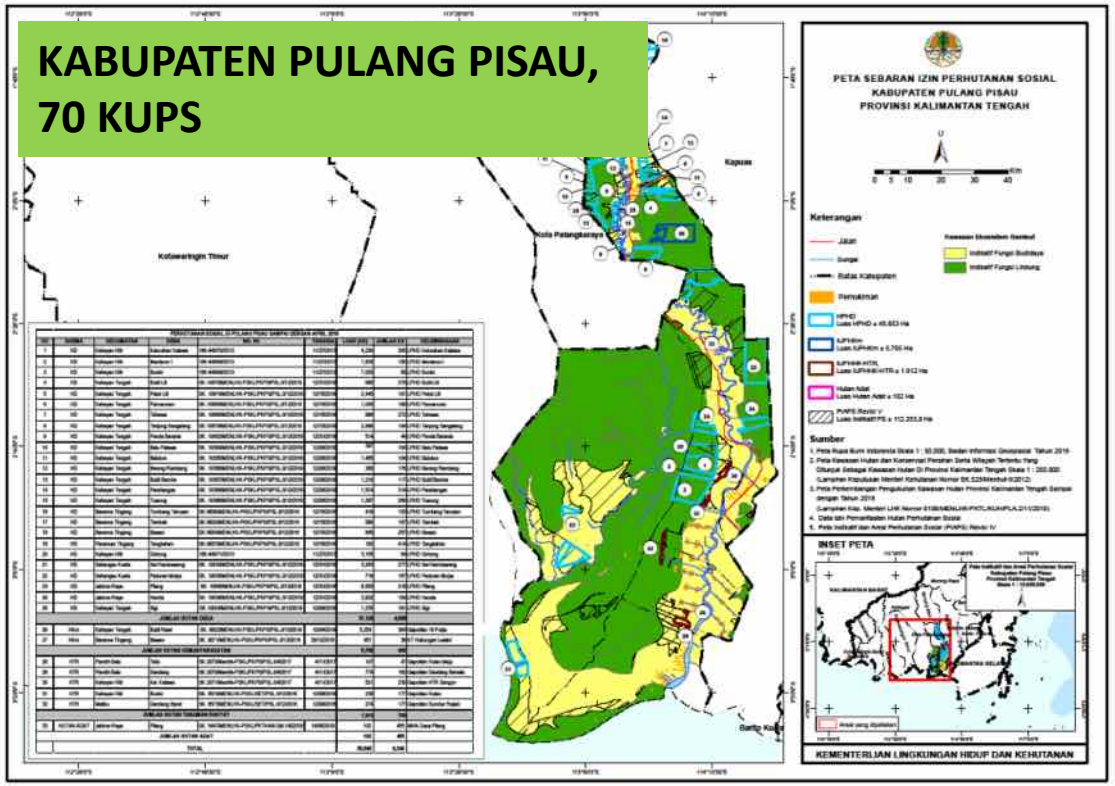
Komponen tanaman yang sudah berproduksi = padi.

6
Progress Kegiatan Pangan Agroforestry Di Kalimantan Tengah

LOKASI KEGIATAN

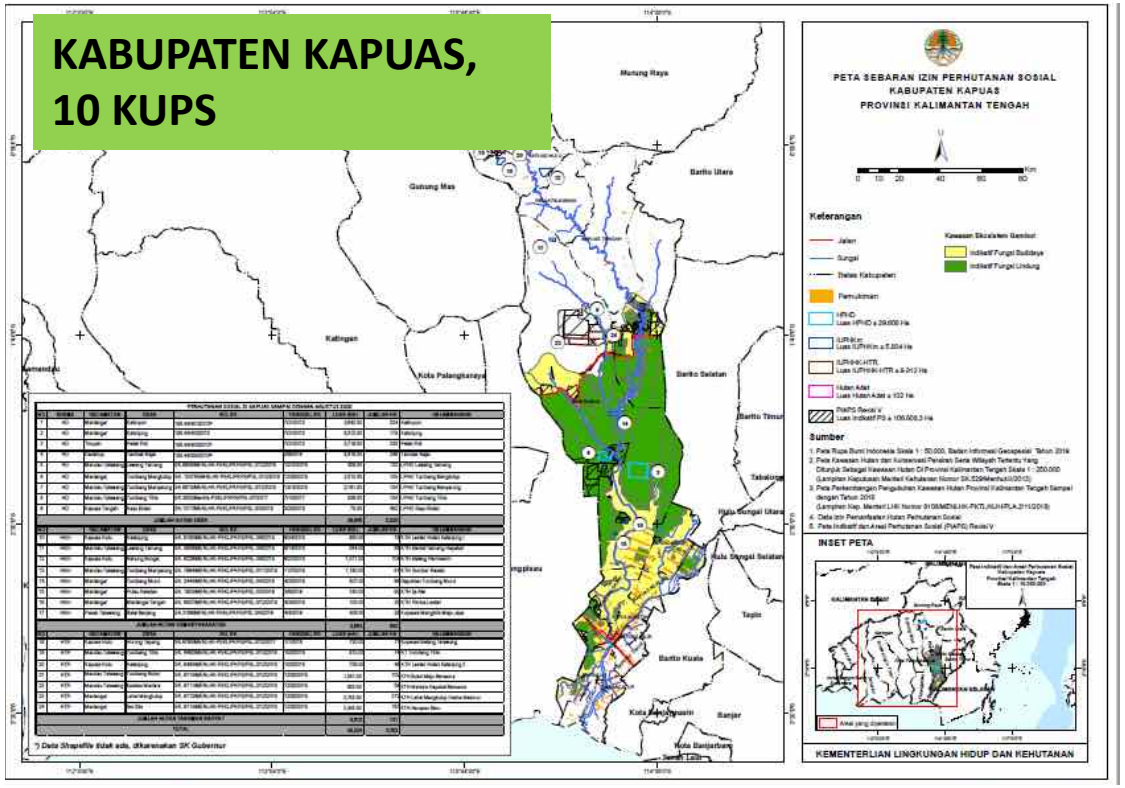
- KALIMANTAN TENGAH (KABUPATEN PULANG PISAU DAN KABUPATEN KAPUAS)
- 80 KUPS (KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL)

KABUPATEN PULANG PISAU, 70 KUPS



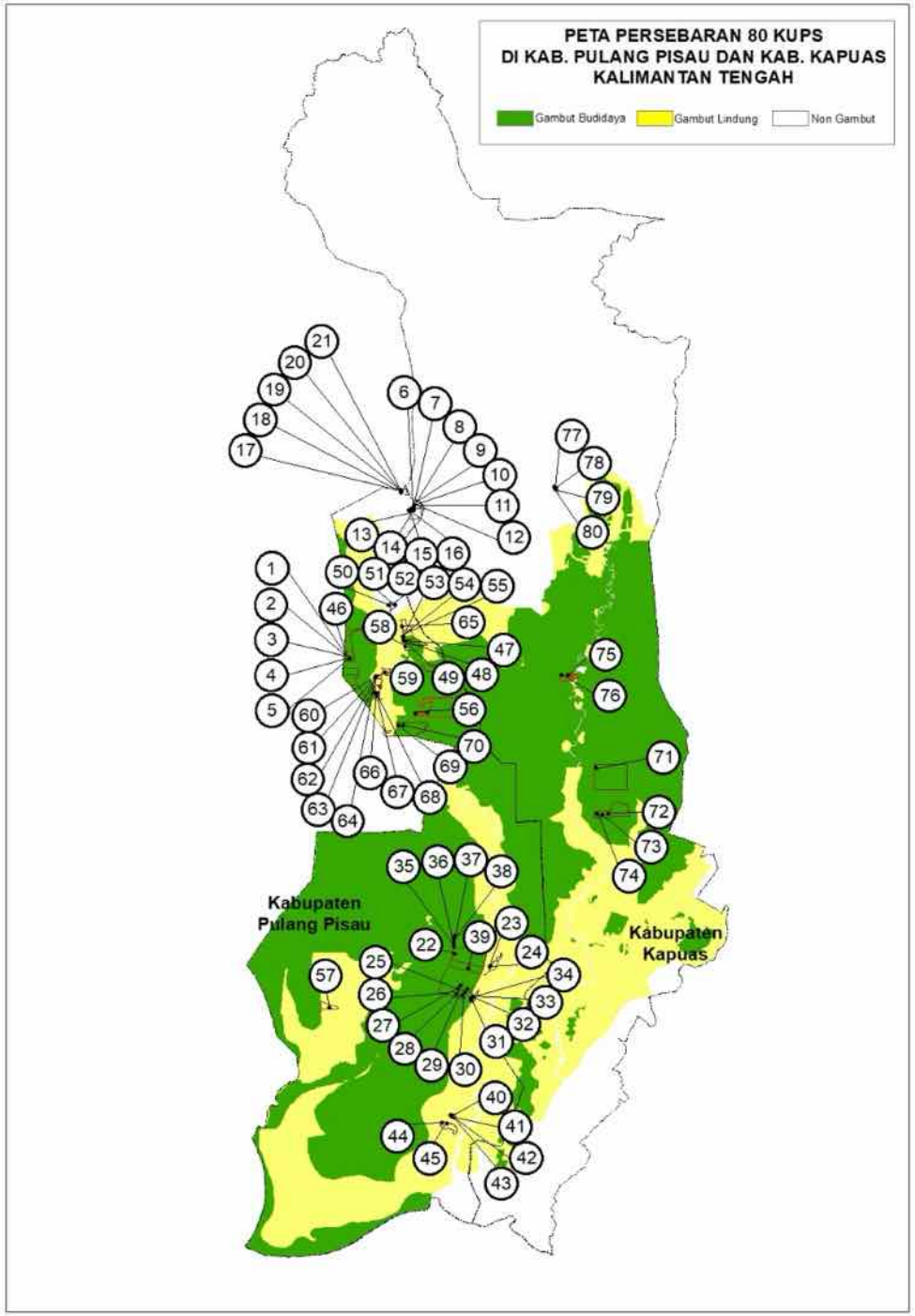
IZIN PERHUTANAN SOSIAL 33 SK , LUAS ±58.848 HA

KABUPATEN KAPUAS, 10 KUPS



IZIN PERHUTANAN SOSIAL 24 SK , LUAS ± 45.224 HA

SEBARAN LOKASI KEGIATAN 80 KUPS DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



TATA WAKTU PELAKSANAAN

No	Uraian	September				October				November				December				Progres
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
A	**Penyiapan/Prakondisi Masyarakat**																	
1	Inventory dan Desk Analysis																	Selesai
2	Pembentukan Tim Kerja																	Selesai
3	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Untuk Kegiatan Pangan Agroforestry Di Areal PS																	Selesai
3	Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembangunan Pangan Agroforestry Di Kalimantan Tengah																	Selesai
4	Survey Tim Pendahuluan																	Selesai
5	Pelatihan Para Pendamping dan KUPS (BP2SDM)																	Selesai
6	Sosialisasi Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Tapak																	Berlangsung
7	Fasilitasi Penyusunan 2 Proposal Pangan Agroforestry (Termasuk Penyusunan dan/atau Revisi RKU dan RKT)																	Berlangsung
8	Penguatan Kelembangaan (Pembentukan KUPS)																	Berlangsung
B	**Fasilitasi Kegiatan Usaha**																	
1	Pembangunan Pangan Agroforestry																	Awal Bulan Oktober
2	Bantuan Alat Ekonomi Produktif Pangan Agroforestry																	Awal Bulan Oktober
3	Bimbingan Teknis dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan																	Berlangsung
4	Pelaporan (Dokumentasi, Publikasi dan Penyebaran Informasi)																	Berlangsung

PROGRESS PROGRAM PANGAN AGROFORESTRY UNTUK 80 KUPS DI KALIMANTAN TENGAH

NO	SKEMA PS	NAMA KUPS	KABUPATEN	PROPOSAL FA	PROPOSAL AEP	VERIFIKASI ADM.	VERIFIKASI TEKNIS	ADM PENCAIRAN	PENCAIRAN BANTUAN FA		PENCAIRAN BANTUAN AEP	
									60%	40%	60%	40%
1	HPHD	KUPS Agroforestri - LPHD Tambak	**Pulang Pisau**	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
2	HPHD	KUPS Ekowisata - LPHD Tambak		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
3	HPHD	KUPS Kerajinan - LPHD Tambak		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
4	HPHD	KUPS Tanaman Obat- Obatan - LPHD Tambak		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
5	HPHD	KUPS Budidaya Lebah Madu - LPHD Tambak		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
6	HPHD	KUPS Agroforestry - LPHD Tumbang Tarusan		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
7	HPHD	KUPS Anggrek Bahalap - LPHD Tumbang Tarusan		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
8	HPHD	KUPS Budidaya Jamur - LPHD Tumbang Tarusan		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
9	HPHD	KUPS Ekowisata dan Jasa Lingkungan - LPHD Tumbang Tarusan		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
10	HPHD	KUPS Hasil Hutan Kayu - LPHD Tumbang Tarusan		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
11	HPHD	KUPS Kerajinan Rotan - LPHD Tumbang Tarusan		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
12	HPHD	KUPS Lebah Madu - LPHD Tumbang Tarusan		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
13	HPHD	KUPS Madu Kelulut Bawan - LPHD Bawan		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
14	HPHD	KUPS Jasa Lingkungan Bawan - LPHD Bawan		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
15	HPHD	KUPS Agroforestry Langanen Bersinar- LPHD Bawan		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
16	HPHD	KUPS Silvofishery Bawan - LPHD Bawan		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
17	HPHD	KUPS Budidaya Madu dan Jamur - LPHD Tangkahen		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
18	HPHD	KUPS Agroforestry - LPHD Tangkahen		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
19	HPHD	KUPS Budidaya Perikanan Darat - LPHD Tangkahen		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
20	HPHD	KUPS Hasil Hutan Bukam Kayu (HHBK) - LPHD Tangkahen		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
21	HPHD	KUPS Agrowisata - LPHD Tangkagen		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
22	HPHD	KUPS Perikanan - LPHD Kalawa		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
23	IUPHHKHTR	KUPS Jamur Tiram - Gapoktan HTR Sengon-Kalawa		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
24	IUPHHKHTR	KUPS Sengon - Gapoktan HTR Sengon-Kalawa		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
25	HPHD	KUPS Madu - LPHD Buntoi		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
26	HPHD	KUPS Pembibitan - LPHD Buntoi		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
27	HPHD	KUPS Perikanan - LPHD Buntoi		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
28	HPHD	KUPS Rotan - LPHD Buntoi		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
29	HPHD	KUPS Ekowisata - LPHD Buntoi		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
30	HPHD	KUPS Karet - LPHD Buntoi		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
31	IUPHHKHTR	KUPS HHBK Buntoi Harapan - IUPHHKHTR Gapoktan Hutan -Buntoi		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
32	IUPHHKHTR	KUPS Sengon Bersama - IUPHHKHTR Gapoktan Hutan - Buntoi		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
33	IUPHHKHTR	KUPS Agroforestry - IUPHHKHTR Gapoktan Hutan - Buntoi		Ok	Ok	Ok	Ok	OK	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
34	IUPHHKHTR	KUPS Anyaman Rotan - IUPHHKHTR Gapoktan Hutan - Buntoi		Ok	Ok	Ok	Ok	OK	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
35	HPHD	KUPS Ekowisata - LPHD Gohong		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
36	HPHD	KUPS Anyaman Rotan Pahari - LPHD Gohong		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
37	HPHD	KUPS Agroforestry - LPHD Gohong		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
38	HPHD	KUPS Jamur Tiram Pambelum - LPHD Gohong		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	

100 % Realisasi Pencairan Tahap I

NO	SKEMA PS	NAMA KUPS	KABUPATEN	PROPOSAL FA	PROPOSAL AEP	VERIFIKASI ADM.	VERIFIKASI TEKNIS	ADM PENCAIRAN	PENCAIRAN BANTUAN 60%	40%	PENCAIRAN BANTUAN 60%	40%
39	HPHD	KUPS Agroforestry Karya Bersama - LPHD Mantaren I		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
40	IUPHHKHTR	KUPS Sengon - Gapotan Hutan Maju Bersama		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
41	IUPHHKHTR	KUPS Agroforestry - Gapotan Hutan Maju Bersama		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
42	IUPHHKHTR	KUPS Jamur - Gapotan Hutan Maju Bersama		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
43	IUPHHKHTR	KUPS Lebah Madu Kelulut - Gapotan Hutan Maju Bersama		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
44	IUPHHKHTR	KUPS Sengon - Gapotan Dandang Bersatu		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
45	IUPHHKHTR	KUPS Ternak - Gapotan Dandang Bersatu		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
46	HPHD	KUPS Rotan - LPHD Bahu Palawa		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
47	HPHD	KUPS Lebah Madu Hutan - LPHD Balukon		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
48	HPHD	KUPS Peternakan - LPHD Balukon		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
49	HPHD	KUPS Jamur Tiram - LPHD Balukon		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
50	HPHD	KUPS Berkat Usaha (Ekowisata) - LPHD Bereng Rambang		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
51	HPHD	KUPS Lebah Madu Kelulut - LPHD Bereng Rambang		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
52	HPHD	KUPS Hanjak Maju (Jamur Tiram) - LPHD Bereng Rambang		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
53	HPHD	KUPS Lebah Madu - LPHD Bukit Bamba		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
54	HPHD	KUPS Agroforestry - LPHD Bukit Bamba		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
55	HPHD	KUPS Ekowisata - LPHD Bukit Bamba		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
56	IUPHKM	KUPS Perikanan - IUPHKm KT 19 POKJA - Ds Bukit Rawi		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
57	HPHD	KUPS Agrofrorestry - LPHD Paduran Mulya		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
58	HPHD	KUPS Sehati - LPHD Pamarunan		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
59	HPHD	KUPS Agroforestry - LPHD Petuk Liti		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
60	HPHD	KUPS Lebah Madu - LPHD Sigi		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
61	HPHD	KUPS Agrosilvopastura - LPHD Sigi		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
62	HPHD	KUPS Peternakan - LPHD Sigi		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
63	HPHD	KUPS Perikanan - LPHD Sigi		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
64	HPHD	KUPS Jasa Lingkungan - LPHD Sigi		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
65	HPHD	KUPS Agroforestry - LPHD Tahawa		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
66	HPHD	KUPS Peternakan - LPHD Tuwung		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
67	HPHD	KUPS Budidaya Lebah Madu Kelulut - LPHD Tuwung		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
68	HPHD	KUPS Perikanan - LPHD Tuwung		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
69	HPHD	KUPS Perikanan - LPHD Tanjung Sangalang		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
70	HPHD	KUPS Agroforestry - LPHD Tanjung Sangalang		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
71	HPHD	KUPS Budidaya Lebah madu "Tampung Karuhei" - LPHD Katunjung	**Kapuas**	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
72	HPHD	KUPS Perikanan Harapan Jadi - LPHD Katimpun		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
73	HPHD	KUPS Pengrajin Rotan "Dare Jawet Katimpun"- LPHD Katimpun		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
74	HPHD	KUPS Budidaya Lebah Madu "Sari Madu Lebah"- LPHD Katimpun		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
75	IUPHKM	KUPS Perikanan "Kapakat"- KTHKm Tumbang Muroi		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
76	IUPHKM	KUPS HHBK "Batuah"- KTHKm Tumbang Muroi		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
77	HPHD	KUPS Segah - LPHD Kayu Bulan		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
78	HPHD	KUPS Hajunjung - LPHD Kayu Bulan		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
79	HPHD	KUPS Bintang Sakti - LPHD Kayu Bulan		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
80	HPHD	KUPS Hapakat - LPHD Kayu Bulan		Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	
Sub Total									**Rp 4.800.000.000**		**Rp 4.800.000.000**	
TOTAL									**Rp**		**9.600.000.000**	

JUMLAH KK YANG TERLIBAT

Data 22/10/2020, Jumlah anggota/KK dari 80 KUPS adalah 2020 anggota/KK, hal ini mengindikasikan bahwa minimal 2.020 orang terlibat dalam Program Pangan Agroforestry di Provinsi Kalimantan Tengah.



Anggota KUPS di Tumbang Muroi

STATUS TARGET 80 KUPS (160 PROPOSAL BANTUAN)

80 KUPS PENCAIRAN BANTUAN TAHAP I UNTUK 60% (RP. 9.600.000.000) = 100% REALISASI

Data, 23 Oktober 2020

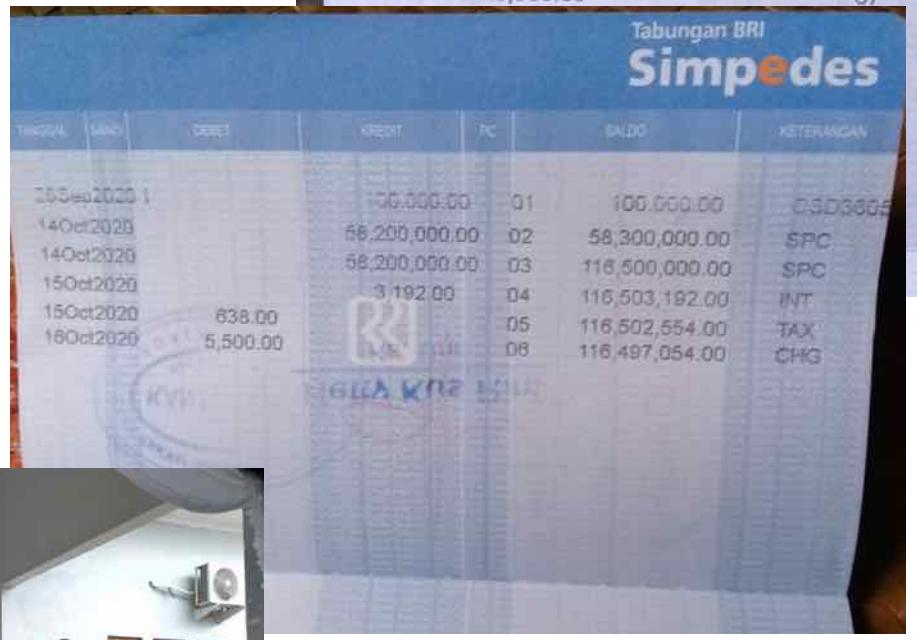
N0	PROGRESS 80 KUPS (160 PROPOSAL)	JUMLAH KUPS	NILAI BANTUAN (60%)	NILAI BANTAUN (40%)	KETERANGAN	
					Pencairan 60%	Pencairan 40%
1	PENCAIRAN	80				
	a. Pangan Agroforestry 60 Proposal		Rp 4.800.000.000	Rp 3.200.000.000	I-III Oktober	Minggu I –II Nov
	b. Alat Ekonomi Produktif 60 Proposal		Rp 4.800.000.000	Rp 3.200.000.000	I-III Oktober	Minggu I – II Nov
	Sub TOTAL		**Rp 9.600.000.000**	**Rp 6.400.000.000**		
TOTAL			**Rp16.000.000.000**			

PROGRES PEMBERIAN BANTUAN

Telah dicairkan bantuan Pangan Agroforestry kepada 80 KUPS (pencairan tahap 1 sebesar 60% dari total nilai bantuan) dengan rincian:

- 80 paket bantuan Alat Ekonomi Produktif (60% = Rp. 4.800.000.000)
- 80 paket bantuan Pembangunan Pangan Agroforestry (60% = Rp.4.800.000.000)









Buku Rekening BRI Yang Menunjukkan Dana telah diterima oleh 80 KUPS

Rp. 9.600.000.000,- (Potong Pajak)

Realisasi Anggaran (Data 25 Oktober 2020)

HIJAU MEMANTAU

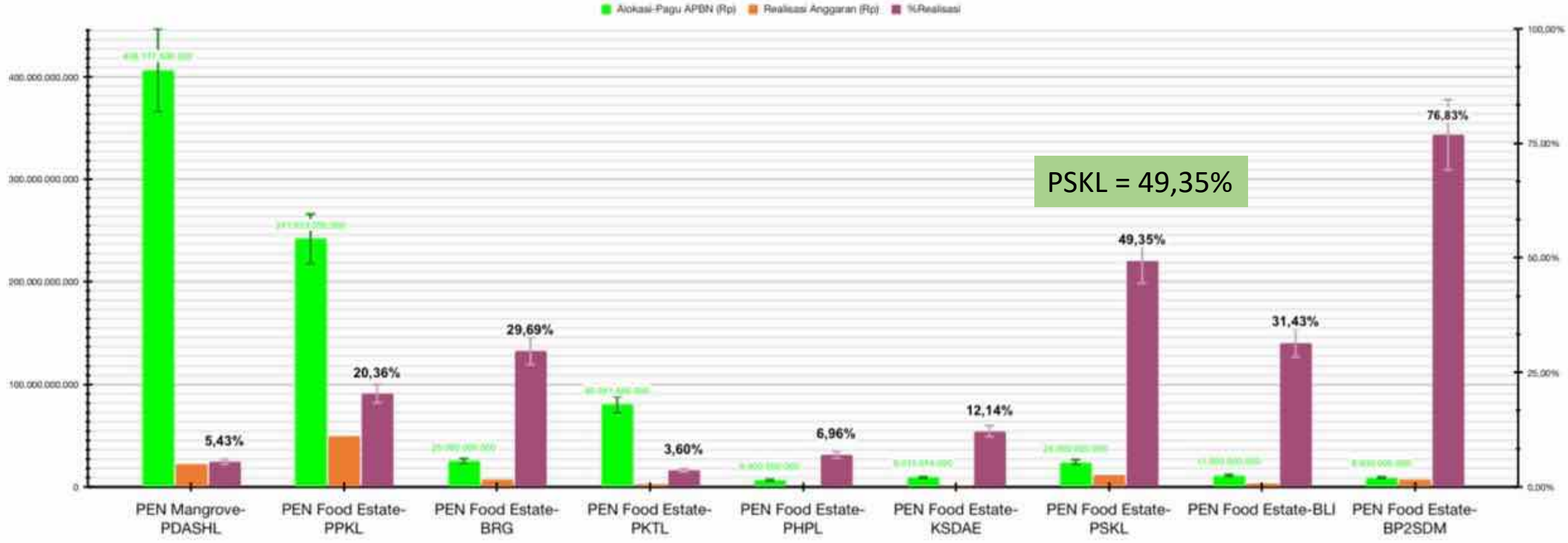
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Minggu, Oktober 25, 2020 21:29:58 WIB KLHK - PEN 12,96%

Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Pagu Rp 812.435.435.000 % realisasi PEN KLHK

PEN-PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PAGU & REALISASI ANGGARAN



RINCIAN REALISASI ANGGARAN

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kegiatan				Anggaran			Aliran Dana yang Diterima oleh Masyarakat (HOK, Honor Non ASN, dll)		
		Target	Satuan	Realisasi	% Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Inventarisasi dan Desk Study Pangan Agroforestry PS	1	Kegiatan	1	100,00%	176.750.000	168.501.400	95,33%	0	0	
2	Bimbingan Teknis dan Monitoring pelaksanaan Kegiatan Pangan Agroforestry PS	4	Bulan	2	50,00%	603.810.000	97.025.000	16,07%	120.000.000	0	0,00%
3	OPERASIONAL KEGIATAN Pangan Agroforestry PS Pusat	4	Bulan	2	50,00%	100.800.000	13.200.000	13,10%	0		
4	Penguatan Kelembagaan (Pembentukan KUPS) Pangan Agroforestry PS	33	Kegiatan	21	63,64%	717.750.000	465.349.000	64,83%	594.900.000	432.349.000	72,68%
5	Sosialisasi Tingkat Tapak Pangan Agroforestry PS					545.500.000	404.322.800	74,12%	302.500.000	284.300.000	93,98%
6	Fasilitasi Penyusunan Rencana Pembangunan Pangan Agroforestry Perhutanan Sosial di Ekosistem Gambut	33	Kegiatan		0,00%	1.914.000.000	129.160.000	6,75%	854.700.000	113.200.000	13,24%
7	**Pembangunan Pangan Agroforestry Perhutanan Sosial di Ekosistem Gambut**	**80**	**Paket**	**80**	**100,00%**	**9.322.900.000**	**5.258.019.500**	**56,40%**	**8.330.000.000**	**4.800.000.000**	**57,62%**
8	Bimbingan Teknis dan Monitoring pelaksanaan Kegiatan Pangan Agroforestry PS	4	Bulan		0,00%	882.400.000		0,00%	166.000.000		0,00%
9	Pelaporan (Dokumentasi, Publikasi dan Penyebaran Informasi) Pangan Agroforestry PS	4	Bulan		0,00%	215.260.000		0,00%	80.000.000		0,00%
10	OPERASIONAL KEGIATAN Agroforestry Pangan PS UPT	4	Bulan	2	50,00%	527.920.000	72.250.000	13,69%	0		
11	**Alat Ekonomi Produktif Pangan Agroforestry Perhutanan Sosial di Ekosistem Gambut**	**80**	**Paket**	**80**	**100,00%**	**8.992.910.000**	**5.236.546.700**	**48,23%**	**8.000.000.000**	**4.800.000.000**	**60,00%**
	TOTAL					**24.000.000.000**	**11.844.374.400**	**49,35%**	**18.448.100.000**	**10.429.849.000**	**56,54%**

Keterangan Pada poin 7 dan 11, Realisasi 100% adalah realisasi Tahap 1

Realisasi Anggaran = 49,35%
Realisasi Dana yang diterima Masyarakat = 56,54%





PEMBUKAAN REKENING BANK BRI SECARA KOLEKTIF DI KANTOR TIM KERJA PANGAN AGROFORESTRY, PALANGKARAYA, TGL 16/10/2020

VERIFIKASI TEKNIS 20 KUPS (VERIFIKASI PERIODE TERAKHIR)



Diskusi Proposal Pangan Agroforestry bersama Ketua KUPS di Desa Pamarunan



Memastikan Dokumen Proposal Kegiatan Pangan Agroforestry dan Proposal Bantuan Alat Ekonomi Produktif di Desa Pamarunan



Bersama beberapa anggota KUPS melihat lokasi Pangan Agroforestry di Desa Pamarunan, 17 Oktober 2020

Kegiatan Verifikasi Melibatkan :

- Fakultas Pertanian/PTP Universitas Palangkaraya
- Balai Litbang LHK Banjarbaru
- Dinas Kehutanan Provinsi
- Pokja Perhutanan Sosial
- KPH
- Pemda Kabupaten (Dinas LH)
- Pendamping

Verifikasi Teknis
KUPS Cahaya Hati – LPHD Petuk Liti
16-19 Oktober 2020



Perjalanan menuju lokasi KUPS pada LPHD Petuk Liti



FGD Pangan Agroforestry bersama anggota KUPS



Peninjauan Lokasi KUPS pada LPHD Petuk Liti







Sosialisasi dan Verifikasi Teknis serta Peninjauan Lokasi Pangan Agroforestry di Desa Buntoi, 17-18 Oktober 2020

Verifikasi Teknis dan Kegiatan FGD di Desa Tumbang Muroi, 16-19 Oktober 2020

Perjalanan Darat menuju lokasi kegiatan dari Palangkaraya ke Kapuas 3 Jam, Kapuas menuju Desa Tumbang Muroi melalui sungai selama 4 Jam



Dermaga di Desa Tumbang Muroi



Verifikasi lokasi I kegiatan pangan agroforestry



FGD kegiatan pangan agroforesrty



Bantuan transport/Saku Kegiatan FGD bagi anggota KUPS

KEGIATAN PENYIAPAN LAHAN PANGAN AGROFORESTRY OLEH KUPS DIBERBAGAI LOKASI













Beberapa Foto Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Pangan Agroforestry

25 Oktober 2020













7
Pen Padat Karya Penanaman Mangrove Perhutanan Sosial

KELOMPOK PELAKSANA PEN PADAT KARYA PENANAMAN MANGROVE PERHUTANAN SOSIAL

No	PROVINSI	BPDASHL	Nama Kelompok	Lokasi			Kegiatan (Ha)				JUMLAH
				Desa	Kecamatan	Kabupaten	Intensif	Pengkayaan	Rumpun Berjarak	Silvofishery	
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KRUENG ACEH	BINA MEUFAKAT	ALUE RAYA	RANTAU SEULAMAT	ACEH TIMUR	58				58
2	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KRUENG ACEH	BANGKA ARAMIYAH	ARAMIYAH	BIREM BAYEUN	ACEH TIMUR	37				37
3	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KRUENG ACEH	JAMPE BANGKA MULIA	PAYA PEULAWI	BIREM BAYEUN	ACEH TIMUR	24				24
4	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KRUENG ACEH	RAWANG INDAH	SEUNEUBOK RAWANG	PEUREULAK TIMUR	ACEH TIMUR	32				32
5	SUMATERA UTARA	WAMPU SEI ULAR	KELOMPOK TANI & NELAYAN MANGROVE	LUBUK KERTANG	BRANDAN BARAT	LANGKAT		91			91
6	SUMATERA UTARA	WAMPU SEI ULAR	LPHD PASAR RAWA	PASAR RAWA	GEBANG	LANGKAT		130.5			131
7	SUMATERA UTARA	ASAHAN BARUMUN	KTH Makmur	Silau Baru	Silau Laut	Asahan		60			60
8	SUMATERA UTARA	ASAHAN BARUMUN	KT. Mardesa	Simandulang dan Tanjung Leidong	Kualuh Leidong	Labuhan Batu Utara		30			30
9	SUMATERA BARAT	AGAM KUANTAN	Peduli Mangrove Mandiangin	KATIAGAN	KINALI	PASAMAN BARAT	30				30
10	RIAU	INDRAGIRI ROKAN	PERIGI RAJA	PERIGI RAJA	KUALA INDRAGIRI	INDRAGIRI HILIR		80			80
11	RIAU	INDRAGIRI ROKAN	SUNGAI PIYAI	SUNGAI PIYAI	KUALA INDRAGIRI	INDRAGIRI HILIR	175				175
12	RIAU	INDRAGIRI ROKAN	KTH Pulau Mandiri	KEMBUNG LUAR	BANTAN	BENGKALIS	15				15
13	RIAU	INDRAGIRI ROKAN	KTH Mangrove Berkah Usaha	SEKODI	BENGKALIS	BENGKALIS	10	10			20
14	RIAU	INDRAGIRI ROKAN	KTH BANGKIT BERSAMA	SEKODI	BENGKALIS	BENGKALIS		10			10
15	BANGKA BELITUNG	BATURUSA CERUCUK	HKm Gempa 01	Kurau Barat	Koba	Bangka Tengah	15				15
16	BANGKA BELITUNG	BATURUSA CERUCUK	HKm Gempita	Kurau	Koba	Bangka Tengah	50				50
17	BANGKA BELITUNG	BATURUSA CERUCUK	HKm Pokdarwis Tanjung Labun	Serdang	Toboali	Bangka Selatan	10				10
18	JAWA BARAT	CIMANUK CITANDUY	Bakau Jaya II	Cemara Kulon	Losarang	Indramayu	57				57
19	JAWA BARAT	CIMANUK CITANDUY	Mangrove Mina Lestari	Cemara	Cantigi	Indramayu	67				67
20	JAWA BARAT	CIMANUK CITANDUY	Putra Kombaya	Cemara	Cantigi	Indramayu	77				77
21	JAWA BARAT	CIMANUK CITANDUY	KTH Surantaka Jaya	Karang Anyar	Pasekan	Indramayu	30				30
22	JAWA BARAT	CIMANUK CITANDUY	Poktan Pelestari Hutan Purwa	Karang Anyar	Pasekan	Indramayu	70				70
23	JAWA BARAT	CIMANUK CITANDUY	KTH Mina Wana Lestari	Cangkring	Cantigi	Indramayu	51				51
24	JAWA BARAT	CIMANUK CITANDUY	KTH Mina Wana Lestari 2	Cemara	Cantigi	Indramayu	99				99
25	JAWA BARAT	CIMANUK CITANDUY	LMDH Bangsal Sari	Totoran	Pasekan	Indramayu	30				30
26	JAWA BARAT	CIMANUK CITANDUY	LMDH Karya Wana Tiris	Pabean Ilir	Pasekan	Indramayu	20				20
27	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS	LPHD SATAI LESTARI	SATAI LESTARI	P. MAYA	KAYONG UTARA			20		20
28	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS	LPHD NIPAH KUNING	NIPAH KUNING	SIMPANG HILIR	KAYONG UTARA			5		5
29	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS	LPHD PADU BANJAR	PADU BANJAR	SIMPANG HILIR	KAYONG UTARA			21		21
30	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS	LPHD PEMANGKAT	PEMANGKAT	SIMPANG HILIR	KAYONG UTARA			9		9
31	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS	LPHD PULAU KUMBANG	PULAUKUMBANG	SIMPANG HILIR	KAYONG UTARA			17		17
32	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS	LPHD BATU AMPAR	BATU AMPAR	BATU AMPAR	KUBU RAYA		17			17
33	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS	LPHD TANJUNG HARAPAN	TANJUNG HARAPAN	BATU AMPAR	KUBU RAYA		5			5
34	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS	LPHD DABONG	DABONG	KUBU	KUBU RAYA		15			15
35	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS	LPHD SEBUBUS	SEBUBUS	PALOH	SAMBAS		43			43
36	KALIMANTAN TENGAH	KAHAYAN	Mina Sejahtera	Sungai Undang	Seruyan Hilir	Seruyan	10				10
37	KALIMANTAN TENGAH	KAHAYAN	Jaya Lestari	Sungai Undang	Seruyan Hilir	Seruyan	10				10
38	KALIMANTAN UTARA	MAHAKAM BERAU	LPHD Liagu	Liagu	Sekatak	Bulungan				50	50
39	BALI	UNDA ANYAR	KTH WANA MERTHA DESA BUDENG	Gilimanuk	Melaya	Jembrana		10			10
40	SULAWESI TENGGARA	SAMPARA	KTH Ronta	Ronta	Bonegunu	Buton Utara		70			70
41	SULAWESI TENGGARA	SAMPARA	KTH Soloy Agung	Soloy Agung	Kulisusu Barat	Buton Utara				6	6
42	SULAWESI TENGGARA	SAMPARA	KTH UPT Buranga	UPT Buranga	Bonegunu	Buton Utara		25			25
43	SULAWESI TENGGARA	SAMPARA	KTH Tangkumaho	Tangkumaho	Napano Kusambi	Muna Barat		16			16
					JUMLAH		**976**	**613**	**73**	**56**	**1,717**





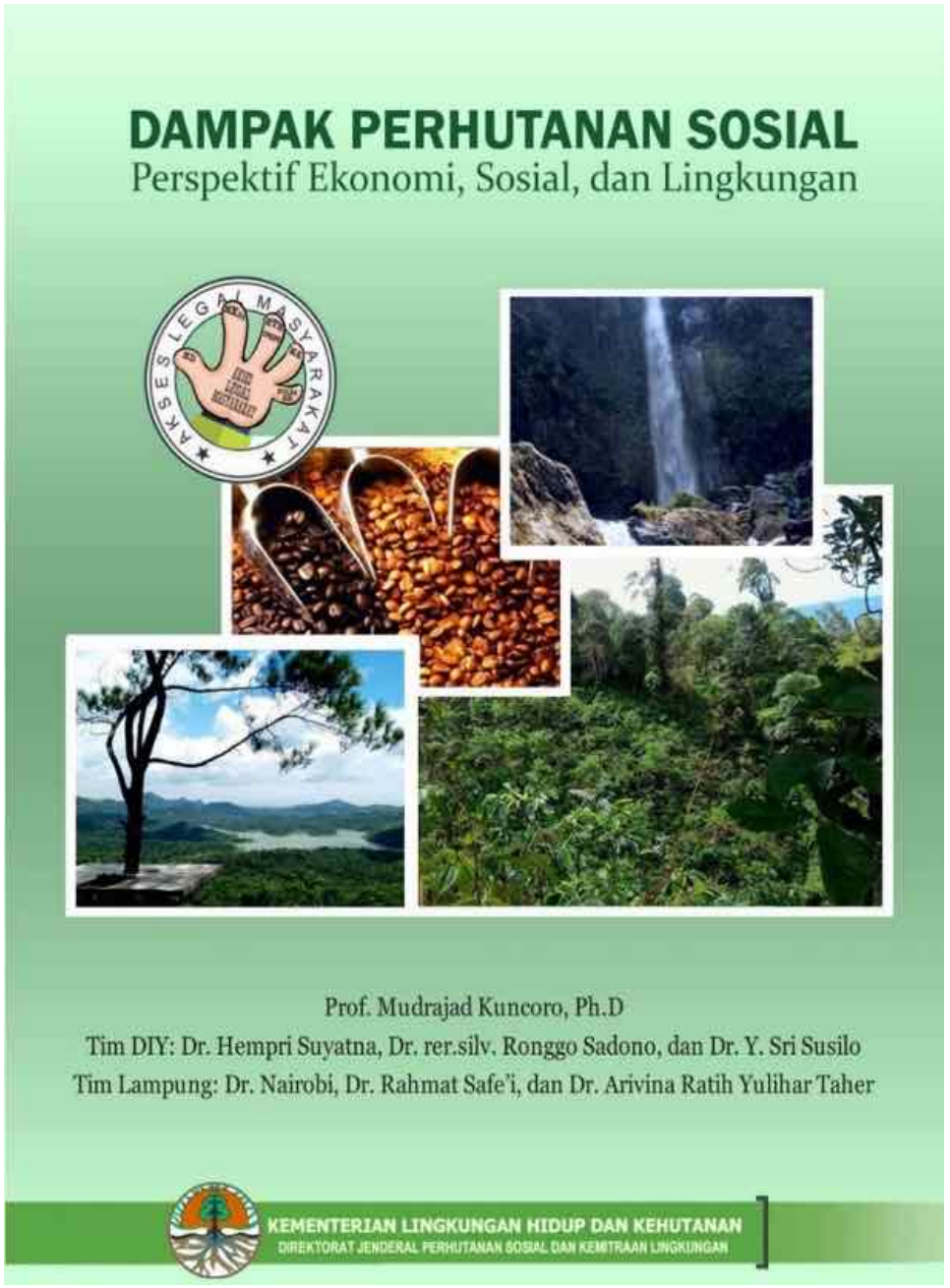




- **Padat Karya Penanaman Mangrove 1 KK Mendapatkan Rp. 2.400.000 Ditransfer Langsung Ke penerima**

- **PEN hutsos mangrove merupakan bagian dari PEN mangrove sebesar 400 miliar untuk rehabilitas 15 ribu ha Mangrove**

8
Dampak Perhutanan Sosial



HASIL KAJIAN DAMPAK PERHUTANAN SOSIAL

PERSPEKTIF EKONOMI, SOSIAL, DAN **LINGKUNGAN** di Jawa and Bagian Selatan Sumatera

Oleh:
Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D.
Tim Universitas Gadjah Mada: Dr. Hempri Suyatna, Dr. Rer.silv. Ronggo Sadono, and Dr. Y. Sri Susilo
Tim Universitas Lampung: Dr. Nairobi, Dr. Rahmat Safe'i, and Dr. Arivina Ratih Yulihar Taher

Maret 2018

Bentuk Perubahan Perilaku

PERUBAHAN PERILAKU

			Perubahan Perilaku		Total
			Tidak	Ya	
Lokasi HKm	Mandiri	Count	0	50	50
		% of Total	0,0%	25,0%	25,0%
	Tani Manunggal	Count	0	50	50
		% of Total	0,0%	25,0%	25,0%
	Sinar Mulya	Count	0	50	50
		% of Total	0,0%	25,0%	25,0%
	Beringin Jaya	Count	1	49	50
		% of Total	0,5%	24,5%	25,0%
Total		Count	1	199	200
		% of Total	0,5%	99,5%	100,0%

Terjadi perubahan perilaku pada semua KTHKm

KTHKm Tani Manunggal: Munculnya rasa memiliki terhadap wilayah HKm.

KTHKm Mandiri: Masyarakat tidak berani mengambil hasil hutan secara sembarangan.

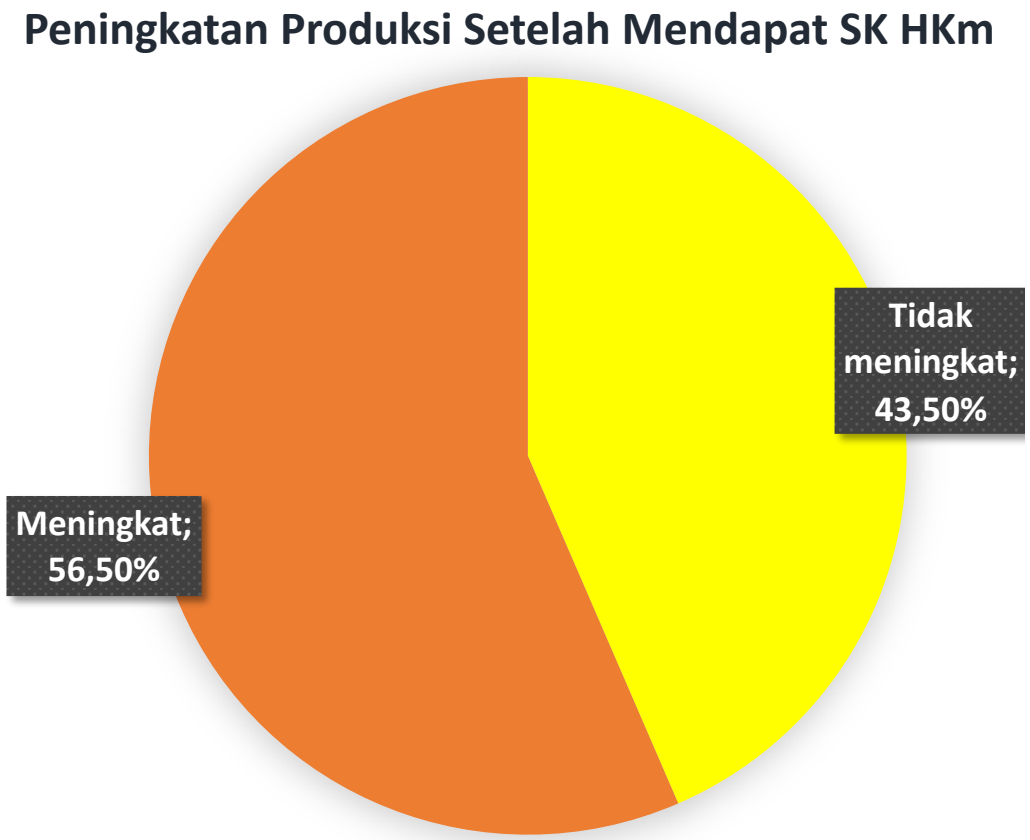
KTHKm Beringin Jaya: Munculnya kesadaran untuk menjaga kelestarian hutan, karena berfikir keberlanjutan masa depan.

KTHKm Sinar Mulya: Berkurangnya kriminalitas. Karena masyarakat sudah mempunyai penghasilan dari perkebunan.

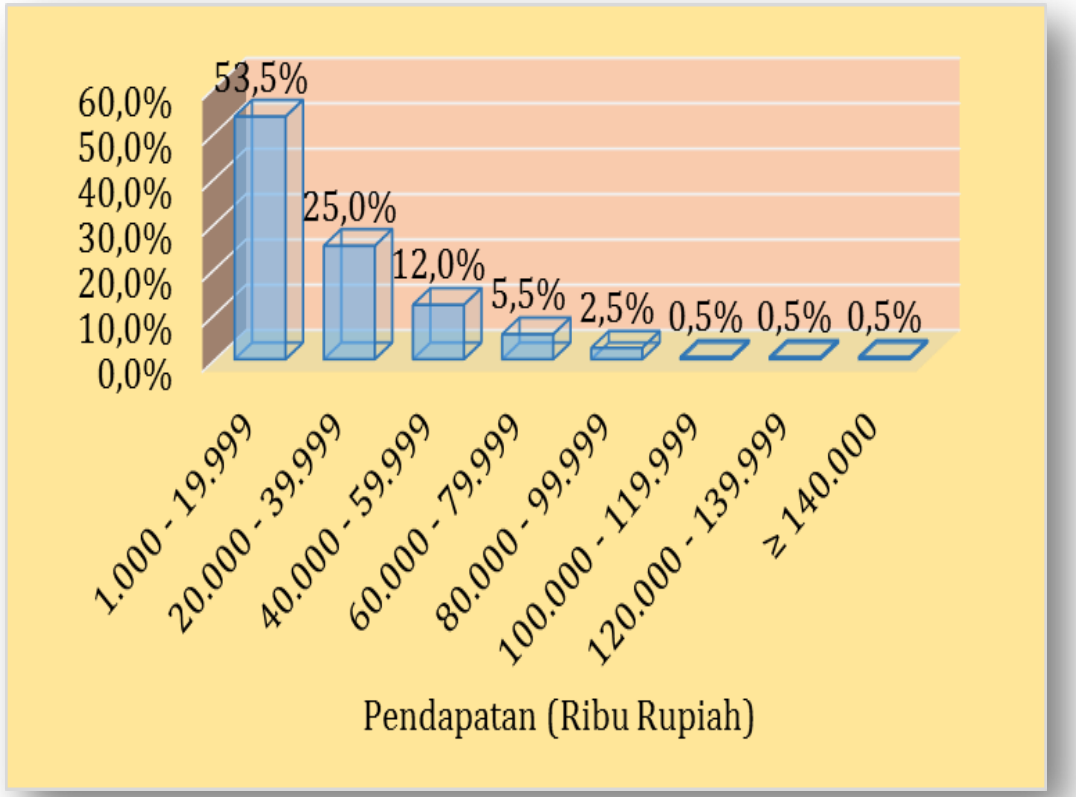
DAMPAK EKONOMI PERHUTANAN SOSIAL

1. Dampak Terhadap Produksi

- Setelah adanya HKm, sebagian besar petani mengalami peningkatan produksi.
- Terdapat perbedaan antara HKm di Lampung dan DIY.
- Di HKm Lampung tanaman utama kopi.
- Di HKm DIY tanaman utama berupa kayu-kayuan (jati, akasia, dll) yang tidak boleh dipanen secara tahunan.



2. Dampak Terhadap Pendapatan



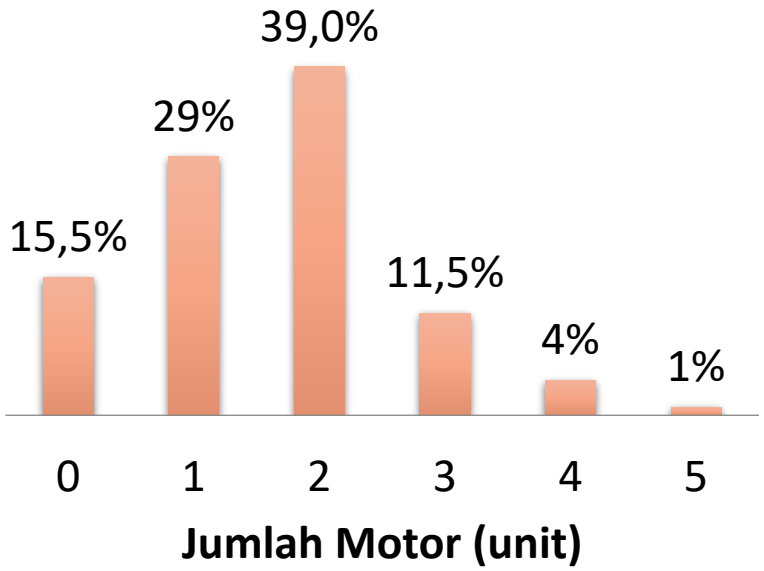
Total Pendapatan per Tahun

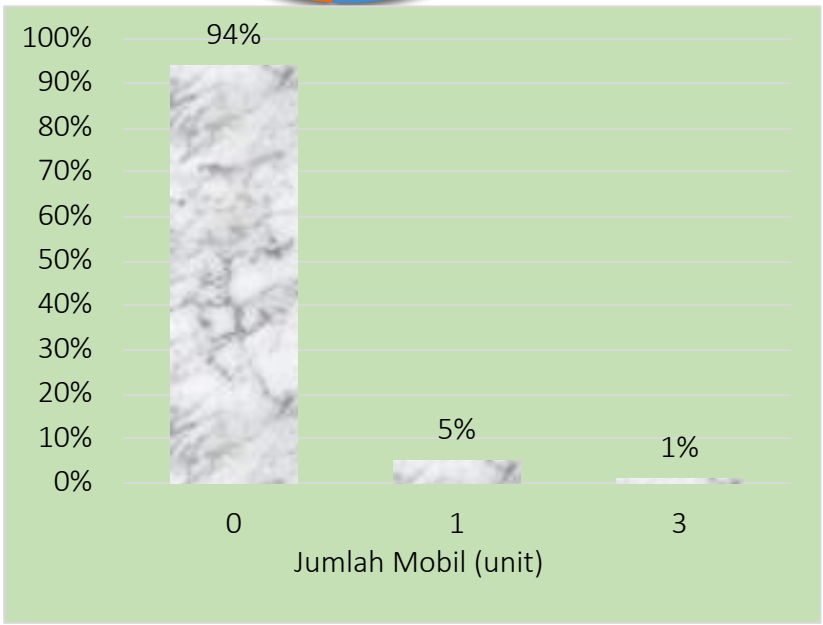
- Pendapatan petani HKm berada antara Rp1 juta hingga Rp140 juta.
- Sebagian besar berada pada interval Rp1-20 juta per tahun yaitu sebesar 53,5 persen
- Rata-rata pendapatan petani HKm Rp28.340.724 per tahun atau Rp2,36 juta per bulan.

3. Dampak Terhadap Kemiskinan

- Dampak HKm bisa dilihat dari jenis rumah, kepemilikan motor dan mobil.
- Rumah milik sendiri.
- Persentase jenis rumah permanen dan semi permanen berimbang.

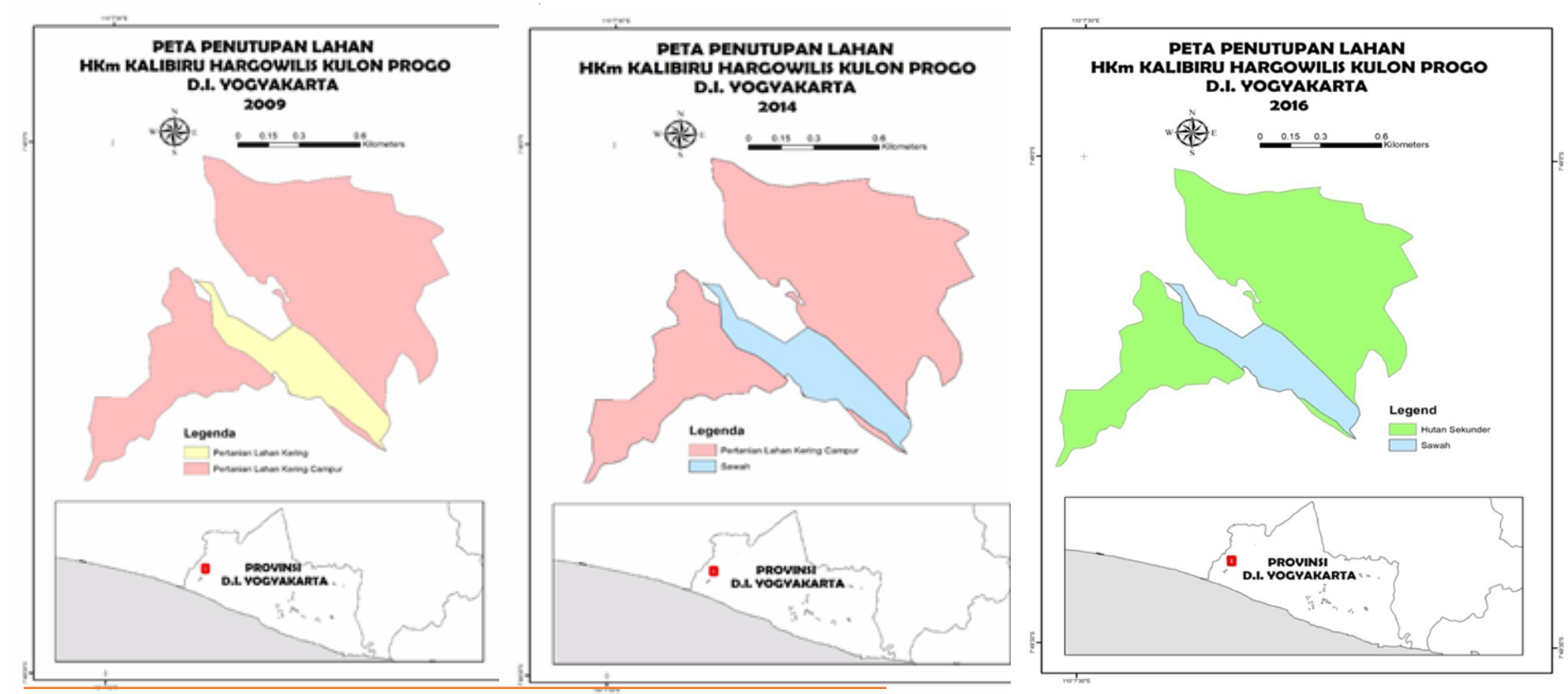






- Petani HKm sebagian besar telah memiliki motor sebanyak 1 hingga 5 unit.
- Hanya sebagian kecil yang memiliki mobil.

4. Perubahan Tutupan Lahan di Lokasi HKm Mandiri Kalibiru tahun 2009, 2014, dan 2016



Lokasi HKm	Tahun	Hutan Lahan Kering Sekunder	Pertanian Lahan Kering	Pertanian Lahan Kering Campur	Sawah
Mandiri	2009	-	19,85	113,77	-
Desa	2014	-	-	113,77	19,85
Kalibiru	2016	113,77	-	-	19,85

Terjadi perubahan tutupan lahan dari pertanian lahan kering campur menjadi hutan lahan kering sekunder

Sumber: Diolah dari Kementerian LHK (2018)

Perubahan Tutupan Lahan di Lokasi HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju tahun 2009, 2014 dan 2016





Lokasi HKm	Tahun	Hutan Lahan Kering Sekunder	Pertanian Lahan Kering	Pertanian Lahan Kering Campur
Sinar Mulya Pekon Sukamaju	2009	66,76	531,34	325,32
	2014	63,85	179,34	680,23
	2016	63,85	179,34	680,23

Sumber: Diolah dari Kementerian LHK (2018)

Terjadinya penurunan hutan lahan kering sekuder seluas 2,91 Ha. Peningkatan pertanian lahan kering campur (Agroforestry)

KAJIAN DAMPAK PERHUTANAN SOSIAL DI JAWA BARAT

IPHPS

RPH MANDALAWANGI, BKPH CIPARAY, KPH BANDUNG SELATAN

RPH SINGKIL, BKPH UJUNG KARAWANG, KPH BOGOR

KULIN KK

RPH RANCAKALONG, BKPH MANGLAYANG, KPH SUMEDANG

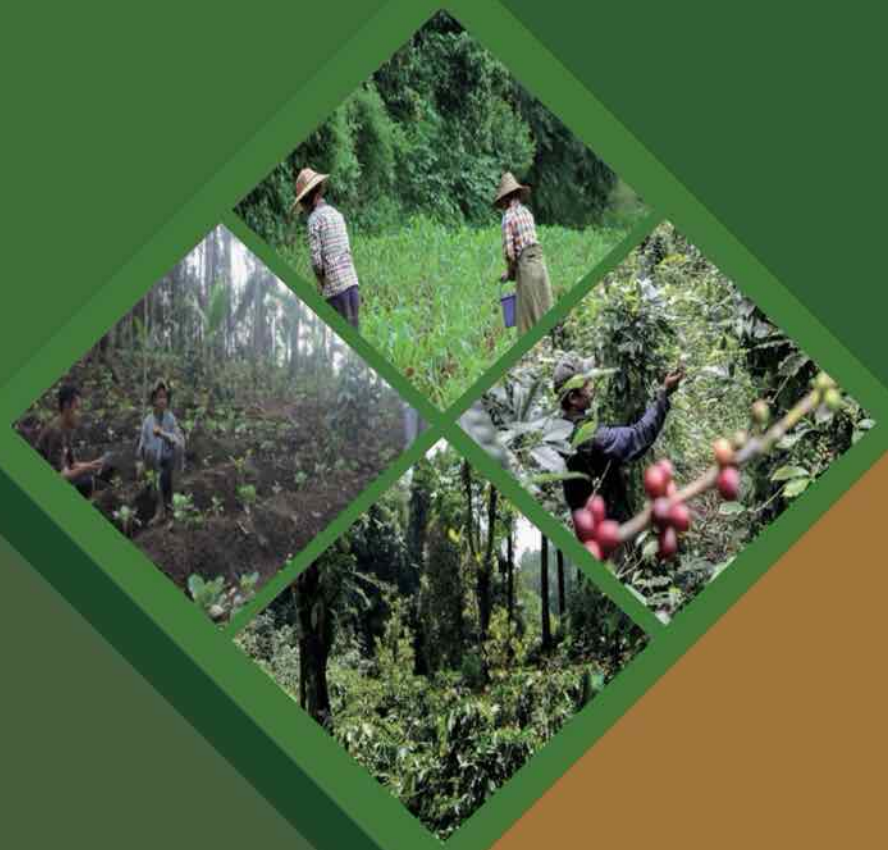
RPH PANCURENDANG, BKPH MAJALENGKA, KPH MAJALENGKA

PT Penerbit IPB Press
Jalan Taman Kencana No. 3, Bogor 16128
Telp. 0251 - 8355 158 E-mail: penerbit.ipbpress@gmail.com
Penerbit IPB Press @IPBpress ipbpress www.ipbpress.com

Kategori Buku
ISBN : 978-602-440-xxx-x

KAJIAN DAMPAK PERHUTANAN SOSIAL DI JAWA BARAT

KAJIAN DAMPAK PERHUTANAN SOSIAL DI JAWA BARAT



DAMPAK EKONOMI

KPH Bogor

Jenis Komoditas



Udang vaname

Analisis Pendapatan

Rata-rata pendapatan : **Rp 217 jt**/6 bulan

Analisis Biaya

Rata-rata biaya usaha : **Rp 167 jt**/tambak



Udang pancet

Analisis Pendapatan

Rata-rata pendapatan : **Rp 43,9 jt**/6 bulan

Analisis Biaya

Rata-rata biaya usaha : **Rp 6 jt**/tambak



Ikan bandeng

Analisis Pendapatan

Rata-rata pendapatan : **Rp 17 jt**/6 bulan

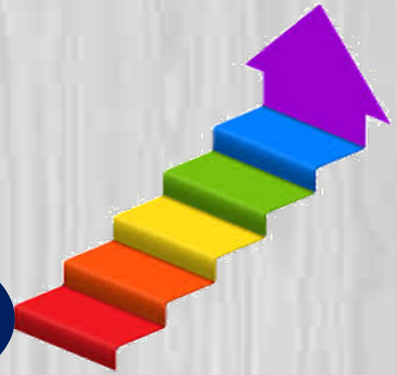
Analisis Biaya

Rata-rata biaya usaha : **Rp 1,8 jt**/6 bulan

Analisis Profit

Usaha Tradisional		Usaha IPHPS
Ikan bandeng	Udang pancet	Udang vaname
	Rata-rata profit usaha : Rp 53 jt/Thn	Rata-rata profit usaha : Rp 100 jt/Thn

Peningkatan Pendapatan Program IPHPS



Meningkat 2x lebih besar

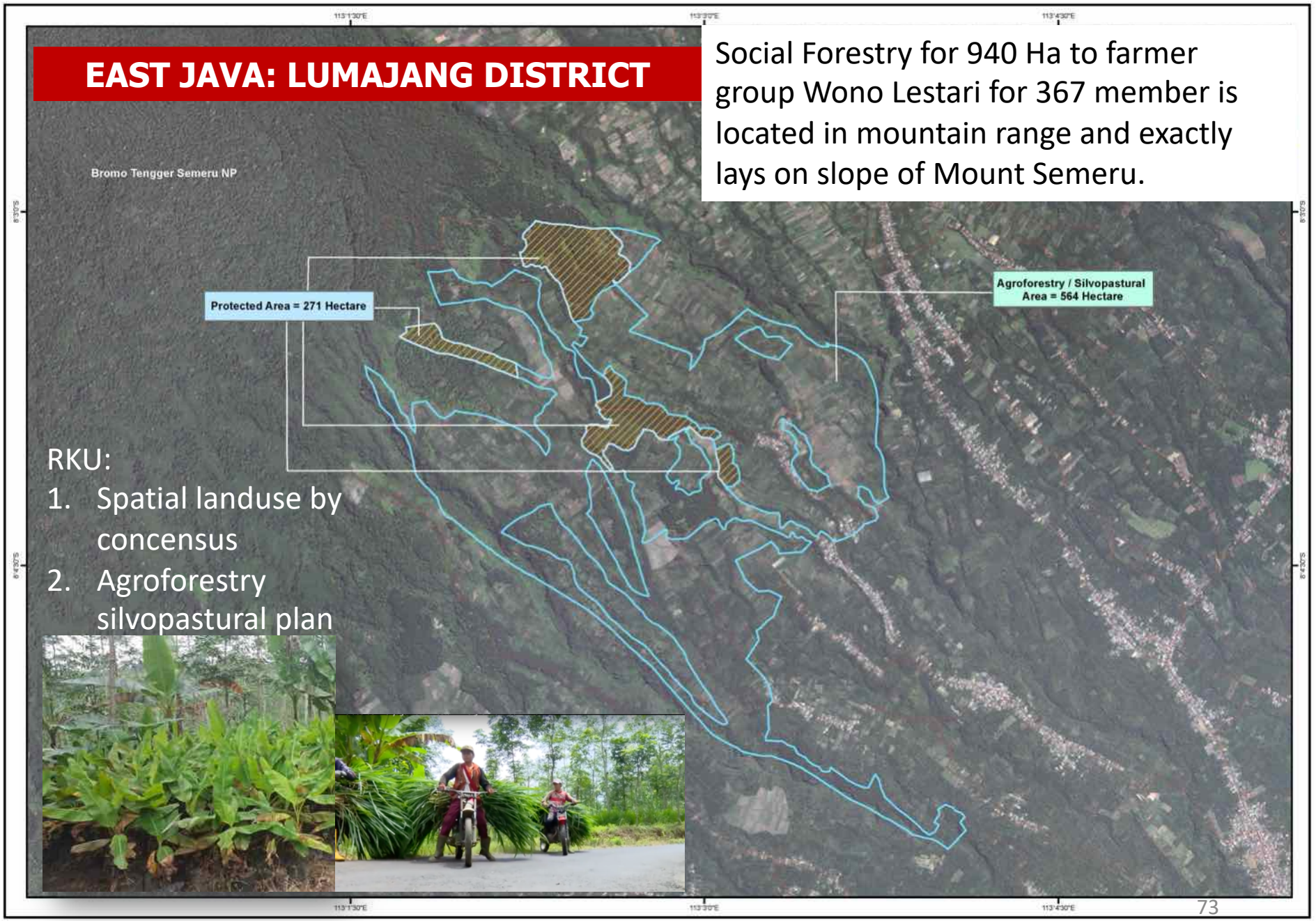
KPH Bandung Selatan

Jenis Komoditas :	Analisis Pendapatan	Analisis Biaya	Analisis Profit
 Tanaman kopi	Rata-rata pendapatan : **Rp 23,2 jt/Thn**	Rata-rata biaya usaha : **Rp 3,3 jt/Thn**	Rata-rata profit usaha : **Rp 19,8 jt/Thn**
 Kol	Rata-rata pendapatan : **Rp 279 rbu/Thn**	Rata-rata biaya usaha : **Rp 948 rbu/Thn**	Rata-rata profit usaha : **Rp 23 rbu/Thn**
 Kacang	Rata-rata pendapatan : **Rp 920 rbu/Thn**	Rata-rata biaya usaha : **Rp 565 rbu/Thn**	Rata-rata profit usaha : **Rp 354 rbu/Thn**
 Wortel	Rata-rata pendapatan : **Rp 2,8 jt/Thn**	Rata-rata biaya usaha : **Rp 1,1 jt/Thn**	Rata-rata profit usaha : **Rp 1,6 jt/Thn**
 Daun bawang	Rata-rata pendapatan : **Rp 3 jt/Thn**	Rata-rata biaya usaha : **Rp 750 rbu/Thn**	Rata-rata profit usaha : **Rp 2,2 jt/Thn**
 Bawang merah	Rata-rata pendapatan : **Rp 5,3 jt/Thn**	Rata-rata biaya usaha : **Rp 2,3 jt/Thn**	Rata-rata profit usaha : **Rp 2,9 jt/Thn**

9
Role Model Perhutanan Sosial

EAST JAVA: LUMAJANG DISTRICT

Social Forestry for 940 Ha to farmer group Wono Lestari for 367 member is located in mountain range and exactly lays on slope of Mount Semeru.



RKU:

1. Spatial landuse by concensus
2. Agroforestry silvopastural plan

PROFIL DAN JENIS USAHA LAINNYA
DI LMDH WONO LESTARI BURNO, SENDURO, LUMAJANG



Sapi perah LMDH Wono Lestari Jumlah sapi yang ada di Desa Burno sebanyak 804 ekor yang dimiliki oleh 216 peternak. Menghasilkan susu sapi segar per hari sebanyak 5.172 liter dengan harga Rp. 5.300/liter

Rumput Gajah untuk pakan ternak Petani memanfaatkan lahan hutan untuk menanam rumput gajah sebagai pakan ternak sapi dan kambing, luas lahan rumput 133 Ha menghasilkan rata-rata per hari 1.700 ikat rumput



PROFIL DAN JENIS USAHA LAINNYA DI LMDH WONO LESTARI BURNO, SENDURO, LUMAJANG





Pembibitan pisang mas kirana, bunga anggrek, dan empon-empon wilayah LMDH Wono Lestari



Petani kopal menghasilkan getah damar sebanyak 1,5 ton per 15 hari dengan harga Rp. 2.200/kg



Peternak Susu Kambing



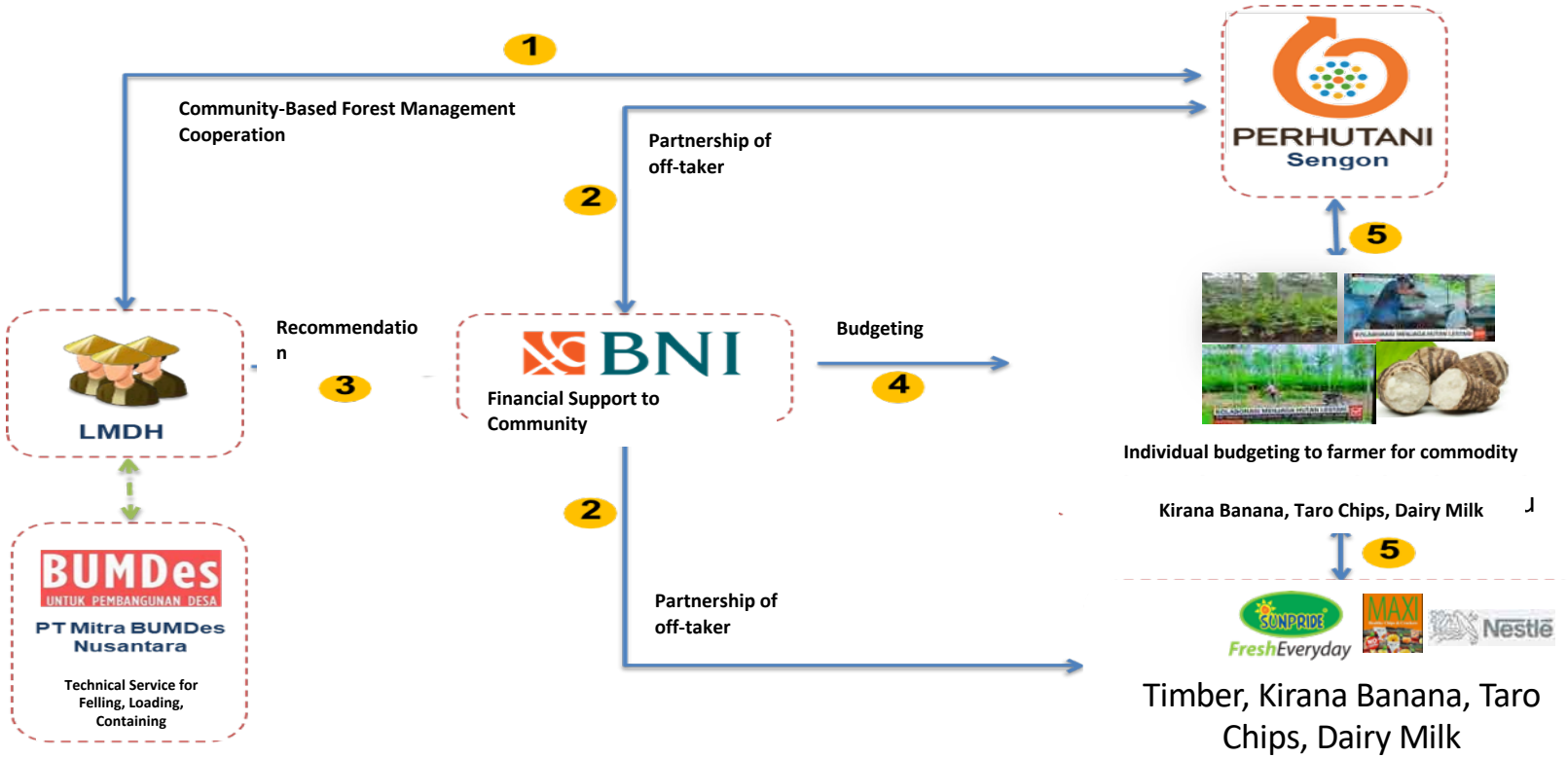


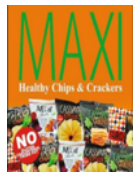


NUTRASI-MAN BKI
UNTUK KOLESTASI



MODEL BUSINESS OF WONO LESTARI SOCIAL FORESTRY, BURNO VILLAGE, LUMAJANG



	PENGHASILAN KTH WONO LESTARI KABUPATEN LUMAJANG (564 ha; 367 KK)			
	KAYU SENGGON	**PISANG KIRANA**	**TALAS**	**SUSU SAPI**
HASIL PANEN	Produksi 300 m^2/Ha, dengan harga Rp.630 .000/m^2 sehingga pendapatannya Rp.189.000.000/ha/6 tahun	2,5 Ton Hasil Panen/Minggu, harga Rp. 6.300/Kg sehingga pendapatannya Rp.15.750.000/minggu	2 Ton/minggu Dengan harga Rp. 3.000/Kg sehingga pendapatanya Rp.6.000.000/minggu	5.172 liter per hari dengan harga Rp. 5. 300/liter, sehingga pendapatannya Rp.27.411.600/hari
PENDAPATAN KOTOR PER-TAHUN	Rp.31.500.000/tahun x 564 ha = 17.766.000.000/tahun	Rp.819.000.000/tahun	Rp.312.000.000/tahun	Rp.10.052.340.000/ tahun
PENDAPATAN BERSIH PER-TAHUN	75% (bagi hasil) x 70 % (biaya produksi) x Rp. 17.766.000.000 = Rp. 9.327.150.000/tahun (56,97%)	90% (bagi hasil) x 70% (biaya produksi) x Rp.819.000.000 = Rp.515.970.000/tahun (3,15%)	90% (bagi hasil) x 70% (biaya produksi) x Rp. 312.000.000 = Rp.196.560.000/tahun (1,20%)	90% (bagi hasil) x 70% (biaya produksi) x Rp.10.052.340.000 = Rp. 6.332.974.200/tahun (38,68%)
PENDAPATAN BERSIH DARI KOMODITAS TAHUNAN, MINGGUAN DAN HARIAN = Rp.16.372.654.200/tahun/367 KK atau Rp.3.717.678/bulan/KK				
OFF-TAKER	Perum PERHUTANI 	PT Sewu Segar Primatama 	PT Maksindo karya anugerah 	NESTLE 

LUBUK KERTANG (SUMATERA UTARA)

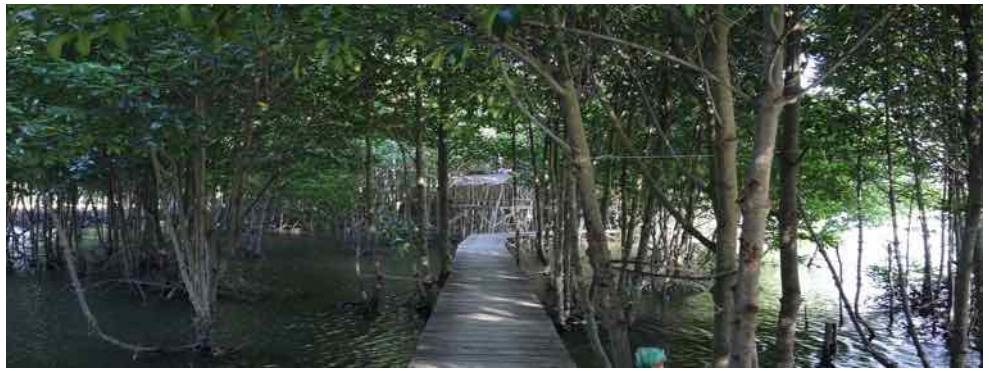




Bagian Utara Pulau Sumatera

- Konflik tenurial -> ilegal cutting untuk tanaman sawit oleh korporasi (penanggulan pantai)
- Gerakan Masyarakat karena seringnya banjir ROB yang merusak tanaman pertanian dan infrastruktur
- Rehabilitasi 700 ha area pantai menjadi mangrove

- Mangrove yang sehat cocok untuk produksi udang, ikan, kepiting -> dengan kearifan lokal: musim panen, pemggunaan bubu yang memungkin kan hanya yang besar yang dipanen
- Masyarakat juga diizinkan untuk membuat tambak seluas 0.08 ha per KK



Dana desa untuk pembangunan infrastruktur wisata





AGROFORESTRY – PADI

Lokasi:
KPH Kedunggalar, KPH Ngawi, Jawa Timur,

Agroforestry - Tebu
Lokasi: KPH Indramayu, KPH Majalengka, KPH Semarang
RNI: 7 Pabrik gula



Terima Kasih



Air Terjun Benang Kelambu, Air Berik NTB

PERHUTANAN SOSIAL